

**PARTAI POLITIK BARU DAN STRATEGI KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**

**(Studi Isu-isu Kampanye Calon Legislatif PSI di Kota  
Semarang)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

**Sulami Luberty**

1506016019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Walisongo  
Semarang  
Di Tempat

*Assalamu''alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulami Luberty  
NIM : 1506016019  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Partai Politik Baru dan Strategi Kampanye Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamua''laikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Oktober 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. Moch. Parmudi, M.Si  
NIP : 1969045252000031001  
Tanggal : 9 Oktober 2019

Bidang Metodologi &Tatatusis



Rofiq, M.Si  
NIP : -  
Tanggal : 9 Oktober 2019

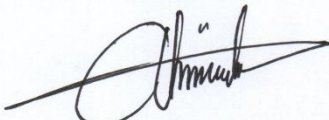
SKRIPSI  
**PARTAI POLITIK BARU DAN STRATEGI KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**  
(Studi Isu-isu Kampanye Calon Legislatif PSI di Kota Semarang)

Disusun Oleh:  
**Sulami Luberty**  
1506016019

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
Pada tanggal 17 Oktober 2019 dan dinyatakan lulus.

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua / Penguji I



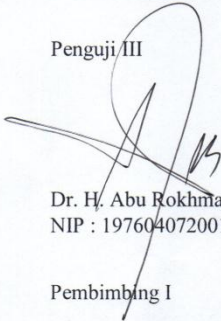
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP : 197809302003121001

Sekretaris / Penguji II



Dr. Mochamad Parmudi, M.Si.  
NIP : 196904252000031001

Penguji III



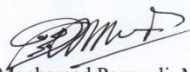
Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag  
NIP : 197604072001121003

Penguji IV



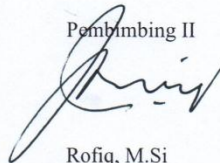
Sholkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP : -

Pembimbing I



Dr. Mochamad Parmudi, M.Si  
NIP : 196904252000031001

Pembimbing II



Rofiq, M.Si  
NIP : -

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Oktober 2019



METERAI  
EMPEL  
ID: 2274AHF05475846  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Sulami Luberty

1506016019

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, taufiq, karunia dan hidayah-Nya kepada umat-Nya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan beserta keluarga, sahabat dan umat Islam seluruh dunia. Amin

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.IP) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan yang bahagia ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

3. H.Adib, S.Ag.,M.Si dan Bapak Muhammad Mahsun, MA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan, dukungan dan nasehat.
4. Dr. Moch. Parmudi, M.Si dan Bapak Rofiq, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Amin Farih, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Ferdian Fajar selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang, Ibu Melly Pangestu dan Bapak Benekditus Narendra Keswara sebagai calon legislatif terpilih yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Yang teristemewah kedua orang tuaku Ayahanda Slamet Rokhani dan Ibunda Sulami serta seluruh keluarga yang tiada henti-hentinya mencurahkan doa, kasih sayang serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Adek penulis satu- satunya Mahkota Mimbar Pangestu, terima kasih telah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat terbaik penulis Shinta Rizki Meilatun, Sufitri, Yuni Fitriana dan Anicka Muzaeni, terima kasih selalu memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman- teman angkatan 39 di Resimen Mahasiswa, Tistna Musfiroh, Hariyanto, Muhammad Syarif Hidayat, Dwi Agung Riyadi, Ahmad Dini Faiza Rosyadi, Malinda, Siti Nurhaliza dan Ahmadzaeni Firdaus, terima kasih untuk motivasi yang kalian berikan. Semoga tali persaudaraan kita tidak terhenti sampai kita menua nanti.
13. Rekan-rekan Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang dalam bangku kuliah dan selalu memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman- teman organisasi Resimen Mahasiswa, Generasi Baru Indonesia (Genbi) UIN Walisongo Semarang dan IMPADIS Pekalongan, yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat.

Akhir kata penulis mengharapkan, masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Penulis berdo'a semoga bantuan dan ketulusan bernilai ibadah di sisi Allah Swt, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Semarang, 11 Oktober 2019

Penulis

Sulami Luberty  
Nim 1506016019

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepadaku dan selalu memberikanku yang terbaik selama ini

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Slamet Rokhani dan Ibunda Sulami yang telah menjadi motivator terhebatku, membesarkanku, mendidikku, mengarahkan langkahku, dan senantiasa selalu berdoa yang terbaik untuk ku

Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang



# **Motto**

**Khairunnas anfa'uhum linnas**

**Sebaik- baik manusia diantaramu adalah yang paling  
banyak memberi manfaat bagi orang lain**

**(HR. Thabrani dan Daruquthni)**

## ABSTRACT

Elections are the first step of political parties in competing for power to occupy the executive and or legislative seats. Political parties and candidates must have a strategy that can determine the victory to win the seat of power. Political campaigns are an arena of struggle to influence voters through political programs and vision and mission that are expected to accommodate the aspirations of the people, so as to maximize the vote acquisition of a political party. The Indonesian Solidarity Party as a new party in the 2019 legislative elections, succeeded in gaining legislative seats at the local level in big cities and urban areas. As a new party, PSI won 6 seats in the city of Jakarta. In other urban cities like, Surabaya gets 4 seats, Bandung gets 3 seats and in Malang gets 1 seat. PSI became the second-highest ranked party in Aceh Province. Meanwhile, in the city of Semarang which is identical to the 'bull pen' PSI managed to get 2 seats.

The purpose of this study: (1) Knowing the campaign strategies used by PSI candidates in the 2019 legislative elections in Semarang City (2) Knowing the supporting and inhibiting factors of the campaign strategies used by PSI candidates in the 2019 legislative elections in Semarang City. This type of research uses a qualitative type of research procedures that produce descriptive data, while the type of research is a case study. Data collection is carried out in research that is by interview and documentation. Primary data in the form of data obtained directly by the author from interviews with informants, while secondary data obtained from documents needed to complete the data in the study. The location of the study was conducted in the city of Semarang. The subjects of this study were the Chairman of the DPD PSI Semarang City and the elected legislative candidates from PSI, while the object of the research was the campaign strategy of the Indonesian Solidarity Party legislative candidates and their inhibiting and supporting factors, the research

informants were selected purposively. Then the data processing techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing.

From the results of the study it can be concluded that the PSI Semarang City candidates in conducting campaigns using several strategies and there are supporting and inhibiting factors faced in winning the 2019 legislative elections in Semarang City. The strategy includes ownership of the issue by using party issues owned by the Indonesian Solidarity party. As well as political communication which includes the political messages used and door to door campaign channels. Factors supporting the success of PSI candidates in winning the legislative elections are (1) Semarang City urban community (2) The strength of the votes of the Indonesian Solidarity party voters in the City of Semarang. While the inhibiting factors of PSI's legislative campaign strategy are (1) Hoax news (2) Campaign funding (3) There is discrimination (4) The emptiness of Indonesian Solidarity party figures.

Keywords: Strategy, Campaign, Legislative Election

## الملخص

الانتخابات هي الخطوة الأولى للأحزاب السياسية في التنافس على السلطة لشغل المقاعد التنفيذية والتشريعية. يجب أن يكون لدى الأحزاب السياسية والمرشحين إستراتيجية يمكن أن تحدد النصر للفوز بمقعد السلطة. الحملات السياسية هي ساحة معركة للتأثير على الناخبين من خلال البرامج السياسية والرؤية والمهمة التي من المتوقع أن تستوعب تطلعات الشعب ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الحصول على أصوات حزب سياسي. نجح حزب التضامن الإندونيسي كحزب جديد في الانتخابات التشريعية في الحصول على مقاعد تشريعية على المستوى المحلي في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. كحزب جديد ، فاز حزب التضامن الإندونيسي بـ 6 مقاعد في مدينة جاكرتا. في مدن حضرية أخرى مثل سورابايا تحصل على 4 مقاعد ، باندونغ تحصل على 3 مقاعد ، وفي مالانج تحصل على مقعد واحد. أصبح حزب التضامن الإندونيسي ثاني حزب يحصل على أعلى الأصوات في مقاطعة آتشيه. وفي الوقت نفسه ، في مدينة سيمارانج التي تتطابق مع "مصارعة الثيران" ، تمكن حزب التضامن الإندونيسي من الحصول على مقعدين

لغرض من هذه الدراسة: (1) معرفة استراتيجيات الحملة التي يستخدمها مرشحو حزب التضامن الإندونيسي في الانتخابات التشريعية لعام في مدينة سيمارانج (2) معرفة العوامل الداعمة والمثبطة لاستراتيجيات الحملة التي يستخدمها مرشحو حزب التضامن الإندونيسي في الانتخابات التشريعية في مدينة سيمارانج. يستخدم هذا النوع من البحث نوعاً نوعياً من إجراءات البحث التي تنتج بيانات وصفية ، في حين أن نوع البحث هو دراسة حالة. يتم جمع البيانات في البحوث التي تتم عن طريق المقابلة والتوثيق. البيانات الأولية في شكل البيانات التي حصل عليها المؤلف مباشرة من المقابلات مع المخبرين ، في حين أن البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الوثائق اللازمة لاستكمال البيانات في الدراسة. أجري موقع الدراسة في مدينة سيمارانج. كان موضوع هذه الدراسة رئيس المجلس التمثيلي الإقليمي لحزب التضامن الإندونيسي في مدينة سيمارانج والمرشح التشريعي المنتخب من حزب التضامن الإندونيسي ، بينما كان الهدف من البحث هو إستراتيجية حملة المرشحين التشريعيين لحزب التضامن الإندونيسي وعوامل تثبيطهم ودعمهم ، وتم اختيار مخبرين البحث عن قصد. ثم تقنيات معالجة البيانات المستخدمة هي الحد من البيانات ، وعرض البيانات واستخلاص النتائج

من نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن المرشحين لحزب سيمارانج للتضامن الإندونيسي في إجراء الحملة يستخدمون العديد من الاستراتيجيات وهناك عوامل داعمة ومثبطة تواجه الفوز في

الانتخابات التشريعية في مدينة سيمارانج. تتضمن الإستراتيجية ملكية المشكلة عن طريق استخدام مشكلات الحزب المملوكة لحزب التضامن الإندونيسي. وكذلك التواصل السياسي الذي يتضمن الرسائل السياسية المستخدمة وقنوات الحملة من الباب إلى الباب. العوامل الداعمة لنجاح مرشحي حزب التضامن الإندونيسي في الفوز بالانتخابات التشريعية هي (1) مجتمع مدينة سيمارانج الحضري (2) قوة أصوات ناخبي حزب التضامن الإندونيسي في مدينة سيمارانج. في حين أن العوامل المثبطة في استراتيجية حملة المرشحين لحزب التضامن الإندونيسي هي أخبار خدعة) تمويل الحملة) هناك تم فراغ شخصية حزب التضامن الإندونيسي

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية ، الحملة ، الانتخابات التشريعية

## **ABSTRAK**

Pemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk merebutkan kekuasaan menduduki kursi eksekutif dan atau legislatif. Partai politik dan kandidat harus mempunyai strategi yang dapat menentukan kemenangan untuk meraih kursi kekuasaan tersebut. Kampanye politik merupakan arena pertarungan untuk mempengaruhi pemilih melalui program politik dan visi misi yang diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perolehan suara sebuah partai politik. Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru pada pemilihan legislatif 2019, berhasil memperoleh kursi legislatif di tingkat lokal pada kota-kota besar dan urban. Sebagai partai baru, PSI memperoleh 6 kursi di Kota Jakarta. Di kota urban lain seperti, Surabaya mendapat 4 kursi, Kota Bandung mendapat 3 kursi dan di Kota Malang mendapat 1 kursi. PSI menjadi partai urutan kedua yang memperoleh suara tertinggi di Provinsi Aceh. Sementara itu, di Kota Semarang yang identik dengan 'kandang banteng' PSI berhasil mendapatkan 2 kursi.

Tujuan penelitian ini : (1) Mengetahui strategi kampanye yang digunakan caleg PSI pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye yang digunakan caleg PSI pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang. Jenis penelitian menggunakan tipe kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data primer berupa data yang didapat langsung oleh penulis

dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang dibutuhkan guna melengkapi data dalam penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Subyek dari penelitian ini adalah Ketua DPD PSI Kota Semarang dan calon legislatif terpilih dari PSI, sedangkan obyek penelitiannya adalah strategi kampanye calon legislatif partai Solidaritas Indonesia serta faktor penghambat dan pendukungnya, Informan penelitian dipilih secara purposive. Kemudian teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa caleg PSI Kota Semarang dalam melakukan kampanye menggunakan beberapa strategi dan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pada pemenangan pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang. Strategi tersebut antara lain kepemilikan isu yaitu menggunakan isu-isu kepartaian yang dimiliki partai Solidaritas Indonesia. Serta komunikasi politik yang meliputi pesan politik yang digunakan dan saluran kampanye *door to door*. Faktor pendukung keberhasilan caleg PSI dalam memenangkan pemilihan legislatif yaitu (1) Masyarakat perkotaan Kota Semarang (2) Kekuatan suara pemilih partai Solidaritas Indonesia di Kota Semarang. Sedangkan faktor penghambat strategi kampanye caleg PSI yakni (1) Berita hoax (2) Pendanaan kampanye (3) Adanya diskriminasi (4) Kekosongan figur partai Solidaritas Indonesia.

**Kata Kunci** : Strategi, Kampanye, Pemilihan legislatif

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN PEMBINGBING.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	18
1) Strategi Kampanye .....	18
2) Demokrasi Elektoral.....	20
3) Teori Kepemilikan Isu.....	27
4) Komunikasi Politik.....	31



G. Metode Penelitian.....	37
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
2) Definisi konseptual .....	39
3) Sumber dan Jenis Data .....	41
4) Teknik Pengumpulan Data .....	42
5) Teknik Analisis Data .....	44
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	47
<b>BAB II MESIN POLITIK, SALURAN DAN ISU KAMPANYE.....</b>	<b>50</b>
A. Mesin Politik.....	50
B. Saluran Kampanye.....	53
1) Saluran Kampanye Melly Pangestu .....	54
2) Saluran Kampanye Benediktus Narendra Keswara .....	59
C. Isu Kampanye PSI .....	61
1) Isu Politik .....	62
2) Isu Kampanye PSI.....	63
3) Agenda Politik PSI.....	74
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>81</b>
A. Gambaran Umum Kota Semarang .....	81
B. Profil Partai Solidaritas Indonesia.....	87
C. Potret Kandidat .....	100
D. Dinamika Pemilihan Legislatif Kota Semarang.....	102
<b>BAB IV STRATEGI KAMPANYE DAN</b>	
<b>FAKTOR PENGARUHNYA.....</b>	<b>120</b>
A. Strategi Kampanye Politik Caleg PSI .....	120
B. Faktor Pendukung Kemenangan Caleg PSI.....	133
C. Faktor Penghambat Stategi Caleg PSI .....	139
D. Implikasi Teori.....	149
E. Model Strategi Kampanye Caleg PSI .....	153
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>155</b>

A. KESIMPULAN.....	155
B. SARAN.....	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perolehan kursi DPRD Kota Semarang Tahun 2019
- Tabel 2. Kepemilikan Isu Menurut Petrocik
- Tabel 3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017
- Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kota Semarang Tahun 2016
- Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut Kota Semarang Tahun 2017
- Tabel 6. APM dan APK jenjang pendidikan Kota Semarang pada tahun 2017
- Tabel 7. Perolehan Jumlah Suara Calon Legislatif PSI Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2019
- Tabel 8. Jumlah Pemilih dalam DPT Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2019
- Tabel 9. Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2014
- Tabel 10. Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2019

Tabel 11. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota Semarang

Tahun 2009 – 2019

Tabel 12. Isu Politik PSI dan Agenda Politik PSI

Tabel 13. Kesesuaian Segmentasi, Sasaran dan Isu Kampanye

Tabel 14. Analisis Strategi Kampanye Caleg PSI Kota Semarang

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Analisis Data Kualitatif
- Gambar 2. Logo PSI
- Gambar 3. Baligo Caleg Melly Pangestu di Semarang Tengah
- Gambar 4. Baligo Caleg Melly Pangestu
- Gambar 5. Kampanye di CFD Simpang Lima Semarang
- Gambar 6. Meet Up di Sebuah Cafe
- Gambar 7. Kampanye Sosialisasi Perkenalan
- Gambar 8. Kunjungan Ke Pedagang Kaki Lima
- Gambar 9. Akun *Facebook* Melly Pangestu
- Gambar 10. Stiker Caleg Benediktus Narendra Keswara
- Gambar 11. Kartu Nama Caleg Benediktus Narendra Keswara
- Gambar 12. Berita Hoax

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Penelitian

Lampiran 2. Daftar Informan

Lampiran 3. DB1-DPRD Kota Semarang

Lampiran 4. BA Penetapan Kursi dan Calon Terpilih

Lampiran 5. AD ART PSI

Lampiran 6. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2009: 3). Juan Linz dan Alfred Stepan, menyebutkan bahwa demokrasi dalam suatu negara dapat dikatakan telah terkonsolidasi dengan baik apabila telah memenuhi tiga syarat. Salah satunya dari syarat tersebut adalah negara telah mampu melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan menggelar pemilihan umum yang bebas dan mendapatkan legitimasi rakyat, dimana warga negara secara efektif menggunakan hak pilih dan dipilih yang dilindungi oleh hukum dan negara (Suswantoro, 2015: 2). Pemilihan Umum tahun 2019, akan menjadi momentum politik baru dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pada pemilu 2019, untuk pertama kalinya pemilu digelar secara serentak (*concurrent election*) yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan dilaksanakan pada waktu bersamaan pada 17

April 2019. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pilpres secara serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu berjumlah 20 partai, yakni 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Dari 16 partai politik nasional, terdapat 4 partai baru yang akan berlagapada pemilu serentak tahun 2019.Keempat partai baru itu adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik, menjadi pintu lahirnya partai-partai baru yang menegaskan adanya pembaruan dari partai- partai lama(Firmanzah, 2007:123). Sedangkan untuk membedakan kebaruan partai dengan partai lama, Barnea dan Rahat memberi kerangka perspektif (Imawan, 2018:10). Pertama, dari aspek partai di kontes elektoral. Aspek ini meliputi label partai (*party label*), seperti apakah nama partai benar-benar baru; ideologi (*ideology*), yakni seberapa berbeda platform atau program partai baru dengan partai lama; dan pemilih (*voters*), yakni seberapa berbeda basis dukungan atau basis sosial pemilih berbeda dengan partai lama. Kedua, aspek partai sebagai



organisasi, meliputi status legal-formal partai, institusi, dan aktivitas partai. Aktivitas partai merujuk pada apakah partai baru memiliki aktivis partai yang baru atau aktivis pindahan dari partai lama. Ketiga, aspek partai di pemerintahan. Aspek ini meliputi dua kriteria yakni, perwakilan, terkait tentang siapa kandidat perwakilan atau kandidat legislatifnya, apakah orang baru atau sebagian berasal dari partai lama, dan kriteria kebijakannya, terkait seberapa berbeda kebijakan partai baru dan partai lama (Imawan, 2018:11).

Jika dilihat dari corak ideologidan *platform* sebuah partai. Keempat partai baru cenderung menawarkan ideologi yang tidak berbeda yaitu sama-sama berada dalam kelompok partai-partai nasionalis. *Platform* partai merupakan cetak biru, di mana sistem nilai dan norma (ideologi) diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang bersifat lebih konkret (Firmanzah, 2008: 119). Adapun pada partai Perindo misalnya, *platform* partai ini terlihat fokus pada aspek perbaikan kondisi ekonomi bangsa, seperti peningkatan *income* perkapita, mengurangi kesenjangan sosial, memperluas lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial (Khaliq, 2016).

PSI merumuskan *platform* transformasi, perubahan Indonesia harus dimulai dari transformasi institusional yakni aspek- aspek normatif dasar yang memberikan kerangka perilaku dan aturan main sebagai warga Negara Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia merumuskan *platform* transformasi ini, dengan kesadaran penuh akan luasnya cakupan dan kompleksitas agenda- agenda kebijakan public nasional (PSI.id, 2019 ). Adapun, menjunjung nasionalis, religius dan kerakyatan menjadi asas penting yang dijunjung tinggi oleh partai Garuda (Purba, 2019). Terakhir, *platform* partai Berkarya ada tiga yaitu partai yang nasionalis, religius dan mengedepankan berkarya (Berkarya.id, 2019).

Pada hasil pemilu serentak 2019, tidak satupun partai baru yang berlaga berhasil lolos syarat ambang batas (*parliamentary threshold*) perolehan suara untuk mendapatkan kursi parlemen. *Parliamentary threshold* adalah batas minimal dukungan yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan perwakilan di parlemen (Pamungkas, 2009: 21). Besaran *threshold* ditiap negara berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang sangat rendah. Tidak ada batasan mutlak bagi tiap negara dalam menentukan Besaran *threshold*. Besaran *threshold* yang

dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan sebutan *legal threshold*. *Legal threshold* dikembangkan pada negara-negara yang memakai sistem pemilu proporsional (Pamungkas, 2009: 20). Di Indonesia sendiri, *parliamentary threshold* selalu berubah setiap tahunnya. Pada pemilu tahun 2009 misalnya, ambang batas saat itu masih 2,5%. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 naik menjadi 3,5%. Pada pemilu 2019, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 414 Ayat 1 disebutkan ambang batas perolehan suara naik menjadi 4%. Besaran *threshold* yang tinggi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi partai kecil dan partai baru, pasalnya pemberlakuan *parliamentary threshold* yang tinggi sangat menguntungkan bagi partai-partai besar yang sudah memiliki basis massa yang tetap.

Menurut perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu tahun 2019, perolehan suara partai baru secara nasional yakni, partai Perindo 2,67%, partai Berkarya 2,09%, PSI 1,89% dan yang terendah partai Garuda 0,50%. Semua partai baru gagal melewati *parliamentary threshold* di tingkat parlemen. Tidak lolosnya semua partai baru ke tingkat nasional pada pemilu 2019, menjadi sejarah

baru sejak pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, partai Demokrat sebagai partai baru sukses meraih 10%. Sementara pada pemilu 2009, partai Gerindra dan Hanura berhasil masuk senayan dengan perolehan 4,46% dan 3,77%. Pada Pemilu 2014, NasDem menjadi satu-satunya partai baru yang berhasil lolos. Partai yang diketuai oleh Surya Paloh ini berhasil lolos dengan perolehan 6,72%.

Meskipun pada pemilu tahun ini, partai-partai baru kandas melewati *parliamentary threshold* di level nasional, partai-partai baru masih mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 414 Ayat (1) dan (2) UU No.7/2017 ambang batas empat persen, hanya diperuntukan untuk penentuan perolehan kursi di DPR RI. Sehingga jika ada partai yang tidak lolos ambang batas parlemen di DPR RI, masih bisa memperoleh kursi ditingkat Daerah yaitu DPRD Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Di tingkat lokal pada kota-kota besar dan urban, perolehan suara PSI cukup mengejutkan. Sebagai partai baru, PSI memperoleh 6 kursi di Kota Jakarta. Di kota urban lain seperti, Surabaya mendapat 4 kursi, Kota Bandung mendapat 3 kursi dan di Kota Malang mendapat 1 kursi. PSI menjadi partai urutan kedua yang memperoleh suara tertinggi di Provinsi

Aceh. Sementara itu, di Kota Semarang yang identik dengan ‘kandang banteng’ PSI berhasil mendapatkan 2 kursi.

**Tabel 1. Perolehan kursi DPRD Kota Semarang Tahun 2019**

Partai Politik	Perolehan Kursi
PDI-P	19
Partai Gerinda	6
Partai Demokrat	6
Partai Keadilan Sejahtera	6
Partai Kebangkitan Bangsa	4
Partai Golkar	3
Partai Amanat Nasional	2
Partai Solidaritas Indonesia	2
Partai Nasdem	2

(sumber : KPU Kota Semarang)

Kota Semarang dikenal dengan ‘kandang banteng’, hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilihan legislatif pada 2014 dan 2019. Menurut perhitungan KPU Kota Semarang pada pemilihan legislatif 2019, PDIP berhasil menjadi partai yang mendominasi dengan perolehan 19 kursi meningkat dari tahun 2014 yang mendapatkan 15 kursi. Pengamat politik Universitas

Diponegoro Teguh Yuwono, menilai bahwa melejitnya perolehan suara PDIP Kota Semarang merupakan representasi menguatnya '*political trust*' atau kepercayaan politik dari masyarakat (Abduh, 2019). Kepemimpinan ketua PDIP Kota Semarang sekaligus Walikota Semarang, Hendrar Prihadi cukup efektif, keadaan ini berdampak pada kepercayaan masyarakat Kota Semarang kepada calon dari PDIP sangat besar. Sementara itu, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, masing-masing berhasil mendapatkan 2 kursi parlemen di Kota Semarang.

Kampanye merupakan salah satu budaya politik demokratis yang melibatkan partai politik, masyarakat, dan berbagai aktor politik. Kampanye merupakan sarana memobilisasi pemilih yang di dalamnya terdapat proses penyampaian visi, misi, dan program politik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat sebagai vote getter. Politik tanpa kampanye dipastikan tidak mungkin, karena kampanye juga merupakan sarana masyarakat mendapatkan gambaran terhadap fungsi sistem politik sekaligus menempatkan masyarakat sebagai evaluator sistem politik (Prasojo, 2004: 23). Menurut ketentuan pasal 1 Ayat 38 UU No.7/2017 Jo. Pasal 1 Ayat 21 PKPU 23 2018

sebagaimana diubah terakhir dalam peraturan KPU No. 33/2018, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri pemilu. Pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye selama lima bulan, terhitung sejak 23 september 2018 hingga 13 April 2019. Sementara itu, kampanye model rapat umum hingga melalui iklan di media massa ditetapkan selama 21 hari sebelum masa tenang, yakni sejak 24 Maret hingga 13 April 2019.

Kampanye merupakan media memperkenalkan program politik yang juga diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perolehan suara sebuah partai politik. Partai politik menilai bahwa kampanye merupakan sarana pembentukan keyakinan politik dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pilihan beragam (*multioption society*), sehingga kampanye tidak jarang didefinisikan sebagai perjuangan kekuasaan (Prasojo, 2004: 30). Proses pembentukan keyakinan politik melalui kampanye membuat partai politik berlomba untuk memasukkan isu strategis ke dalam agenda politiknya agar menarik dukungan

maksimal dari masyarakat sebagai pemilih (Rokhmah, 2014: 582). Beragam macam isu strategis ditawarkan sebagai komoditas utama para partai politik untuk menjaring dukungan masyarakat. Isu-isu seperti perempuan, anti korupsi, toleransi dan anak muda merupakan isu strategis yang coba ditawarkan PSI kepada masyarakat. Caleg PSI tentu menggunakan isu-isu tersebut sebagai alat kampanye untuk memaksimalkan dukungan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu mengetahui bagaimana strategi kampanye Caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif di kota Semarang 2019.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana strategi kampanye caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif di Kota Semarang 2019 ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana strategi kampanye caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif di kota Semarang 2019.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif di kota Semarang 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian akademis mengenai partai politik, khususnya berkaitan dengan strategi kampanye Caleg partai Solidaritas Indonesia dalam pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan informasi mengenai Strategi kampanye dalam pemilihan legislatif 2019.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan refrensi bagi mahasiswa

Ilmu Politik, khususnya dalam kajian terkait strategi kampanye partai politik di pemilu 2019.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi calon legislatif yang lain untuk memanfaatkan strategi dan kekuatan politik yang dimiliki partai Solidaritas Indonesia dalam menghadapi pemilihan legislatif di Kota Semarang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Studi tentang kampanye politik merupakan studi yang sudah banyak dikaji oleh para ahli politik. Dalam dua dekade terakhir abad ke- 20 studi tentang kampanye muncul dengan sendirinya sebagai bidang penelitian penting dalam komunitas ilmu politik (Richard, 2014: 199 ). Dari beragam studi tentang strategi kampanye yang telah dikaji, penulis memetakan fokus kajian ke dalam tiga kelompok.

### **1. Strategi Kampanye Pemasaran Politik**

**Pertama** adalah penelitian dari Nurdiansyah (2014), dalam penelitiannya dengan judul “*Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014*”. Penelitian ini mengkaji tentang strategi pemasaran

politik yang dilakukan Partai Gerindra menjadikan figur Prabowo Subianto sebagai brand atau produk politik sebagai produk utama. Strategi yang dijalankan adalah menjangkau dukungan sebesar-besarnya dari masyarakat melalui turun langsung ke masyarakat, kemudian melalui media massa yang diselenggarakan oleh badan komunikasi Partai Gerindra. Partai Gerindra membidik segmen masyarakat kelas bawah dan segmen pemuda, dalam menentukan target sasaran Partai Gerindra memfokuskan pada kelompok masyarakat kecil (petani, nelayan, buruh, guru, dan pedagang kecil). Dalam hal *positioning*, Partai Gerindra memposisikan diri berada di luar pemerintahan dan memposisikan diri sebagai partai rakyat kecil. **Kedua** oleh Yustian (2008) dalam penelitiannya di Kota Bogor dengan judul “*Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaatang Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah*”. Penelitian ini mengkaji perbedaan strategi dari tim kampanye pasangan calon incumbent dan pendaatang baru. Hasilnya pada tahap perencanaan kampanye, tim kampanye pendaatang baru melakukan *targeting*, sementara tim *incumbent* tidak melakukannya. Teknik kampanye pasangan pendaatang baru lebih mampu menyentuh

masyarakat secara langsung, karena dilakukan dengan teknik kampanye dari rumah ke rumah (*direct selling*) dan kunjungan ke pusat aktivitas masyarakat.

## 2. Strategi Kampanye Komunikasi Politik

**Pertama** penelitian oleh Sutanto (2011) di Kota Semarang dengan judul “*Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang*” penelitian ini mengkaji strategi yang digunakan Partai Demokrat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, event, kampanye, *money politic* dan pencitraan meliputi figur, citra partai. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi ekonomi (keuangan), waktu dan tenaga. **Kedua** penelitian oleh Al-Husainn (2016) di Kota Bandung dengan judul “*Strategi Komunikasi Politik Kader Muda Partai Gerindra*”. Penelitian ini mengkaji bahwa political branding sebagai bagian dari aktivitas politik yang dijalankan oleh Al-Haddad diantaranya adalah sebagai bagian dari kampanye politik, sebagai sebuah cara untuk

mengkomunikasikan pesan politik kepada masyarakat, baik yang terkait dengan pemilu legislatif maupun pesan lain seperti rekam jejak seorang politisi selepas pemilu, kemudian political branding juga dimaknai sebagai upaya komunikasi politik dengan terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan pendekatan yang konsisten pada komitmen, sebagai upaya politik yang akan mampu memberikan pengaruh pada pemberian suara rakyat pada saat pemilu kepada para politisi yang menjadi peserta pemilu.

### **3. Strategi Kampanye Isu-Isu Politik**

**Pertama** penelitian oleh Rakhmah (2014) yang berjudul “Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik” penelitian tersebut menjelaskan tentang isu pendidikan yang lazim digunakan partai politik atau calon Kepala Daerah/Kepala Negara untuk menjaring dukungan masyarakat dalam kampanye. Isu-isu pendidikan dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam menentukan dukungan dan arah afiliasi terhadap partai politik/calon Kepala Daerah/Kepala Negara tertentu. Daya tarik isu pendidikan dalam proses politik disebabkan karena

pendidikan dinilai sebagai salah satu bagian penting dari kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari proses menuju peningkatan kesejahteraan hidup. **Keduap** penelitian oleh Tabroni (2014) di Jawa Barat dengan judul “Pesan Politik Calon Kepala Daerah di Media Massa pada Masa Kampanye” penelitian ini menjelaskan bahwa peta isu yang dikembangkan dalam kampanye politik Cagub dan Cawagub Jabar 2008, menemukan sebuah fakta tertulis bahwa ternyata isu- isu politik akan sangat mengundang perhatian dan simpati publik jika menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Ada sejumlah rangkaian persoalan publik yang sesungguhnya dapat dijadikan isu krusial dalam sebuah kampanye politik. Untuk kasus di Jawa Barat, persoalan pendidikan adalah sektor yang strategis untuk diangkat mengingat rata- rata pendidikan sangat rendah dan jumlah anak yang mengenyam bangku sekolah sangat minim. Hal ini juga sangat beririsan signifikan dengan persoalan ekonomi yang diakibatkan oleh ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan besaran isunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga minimnya IPM di Jawa Barat menjadi

salah satu alasan penting mengapa harus mengangkat pointer- pointer yang dianggap lemah dalam parameter keberhasilan sebuah daerah.

Dari ketiga kelompok tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa kelompok satu mengkaji kampanye melalui langkah- langkah yang efektif dan efisien dalam menerapkan konsep pemasaran untuk dipraktekkan sebagai strategi kampanye pemasaran politik. Penelitian kelompok dua mengkaji bahwa kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi politik. Dan kelompok tiga lebih mengkaji satu aspek yang tidak kalah penting dalam kesuksesan kampanye politik yaitu isu politik. Lebih spesifik yaitu memilih isu strategis untuk sebuah kondisi di mana kampanye itu dilakukan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan memperkuat pada kelompok kedua dan ketiga, yakni strategi kampanye politik melalui isu- isu politik yang ditawarkan dan strategi komunikasi politik yang digunakan caleg PSI Kota Semarang. Penulis akan meneliti bagaimana *Partai Politik Baru dan Strategi kampanye dalam Pemilihan Legislatif 2019 (Studi Isu- isu Kampanye Caleg PSI di Kota Semarang)*. Menurut

sependek pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang partai politik baru dalam strategi kampanye partai politik pada Pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang, lebih khususnya yang membahas isu- isu kampanye Caleg PSI.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Strategi Kampanye**

Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam kampanye, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal (Cangara, 2016 : 252). Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*ways*). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Nasution, 2006: 56). Menurut Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial (Nimmo, 2006 : 195). Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah



khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Venus, 2004 : 7).

Berdasarkan definisi tersebut, Umaimah menyatakan bahwa kampanye politik adalah : (1) proses tranformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk memengaruhi serta menciptakan opini publik. (2) Sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum. (3) Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, baik waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan politik (Umaimah, 2016 : 164).

Adapun tujuan kampanye politik adalah (1) melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap- sikap, tindakan-

tindakan praktis dan perilaku tertentu. (2) Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial. (3) menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak. (4) Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Umaimah, 2016 : 165). Jadi, strategi kampanye adalah sebuah rencana yang sistematis dan dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi kampanye inilah partai politik mampu memenangkan suara masyarakat dalam pemilihan umum.

## **2. Demokrasi Elektoral**

Robert A. Dahl menggunakan istilah “*Polyarchy*” sebagai pengganti istilah demokrasi untuk merujuk sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi sebagai berikut. Pertama, kompetisi yang luas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok seperti partai politik. Kedua, partisipasi politik untuk memilih pemimpin dan kebijakan. Ketiga, tingkat kebebasan sipil dan politik. Bagi Dahl, demokrasi mengindikasikan bentuk ideal, sedangkan polyarchy merujuk pada persyaratan, mulai dari kebebasan membentuk organisasi sampai dengan menetapkan institusi untuk membuat kebijakan pemerintah atas dasar suara

(votes) dan ekspresi lainnya yang menjadi keinginan masyarakat (Dahl, 1992: 89).

David Held menjelaskan bahwa ada tiga jenis atau model pokok demokrasi. Pertama, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik di mana warga negara terlibat secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena Kuno. Oleh karena itu, Mohammad Nasih menyebut demokrasi langsung sebagai demokrasi paling kuno dalam sejarah dunia. Kedua, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas mewakili kepentingan atau pandangan dari para warga negara dalam daerah yang terbatas, sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. Robert A. Dahl dalam buku *Democracy and Its Critics* menjelaskan bahwa demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat menjadi praktis untuk jangka waktu lama dan mencakup wilayah yang amat luas. Pada 1820, James Mill menyatakan, sistem perwakilan sebagai penemuan besar di masa-masa modern di mana penyelesaian segala kesukaran, yang bersifat pemikiran maupun praktis, mungkin akan

ditemukan. Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan suatu bentuk demokrasi juga). Dalam perjalanan bangsa Indonesia, ketiga model demokrasi ini menjadi “dialektika negara” di kalangan ilmuwan dan politisi untuk diterapkan dalam konteks negara bangsa yang kaya akan sumber daya ini (Held, 2004: 5).

Dalam kerangka mewujudkan demokrasi substantif, proses demokratisasi di tingkat lokal berperan sangat penting. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Brian C. Smith sebagaimana dikutip Kacung Marijan, bahwa demokrasi di tingkat lokal merupakan prasyarat bagi terbangunnya demokrasi di tingkat nasional. Untuk mendukung keyakinan teoritiknya ini Smith mengungkapkan empat argumentasi berikut. Pertama, demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara didalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini terutama karena tingkat proximity (kedekatan) antara pemerintah daerah dengan masyarakat, yakni lebih dekat. Kedua, pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol perilaku pemerintah

pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti-demokrasi di dalam suatu pemerintahan yang sentralistis. Kecenderungan seperti ini khususnya terjadi dalam masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Di dalam masa transisi ini pemerintah daerah memiliki posisi tawar-menawar kekuasaan yang lebih tinggi atas kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat (Kacung, 2011: 170).

Ketiga, demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional. Fakta bahwa komunitas di daerah relatif terbatas dan masyarakatnya lebih mengenal di antara satu dengan lainnya dianggap sebagai dasar argumen bahwa partisipasi di daerah itu lebih bermakna dibandingkan dengan di tingkat nasional. Partisipasi di daerah lebih memungkinkan adanya *deliberative democracy*, yakni adanya komunikasi yang lebih langsung di dalam berdemokrasi. Keempat, kasus negara Kolumbia misalnya (sebagai salah satu rujukan), menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat lokal. Penguatan legitimasi

ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan daerah kepada pemerintah pusat (Kacung, 2011: 171).

Kontruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya, adalah menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*). Menurut Dahl, demokrasi perwakilan menemukan bentuk kontemporeranya yang jelas yaitu, sekumpulan undang-undang dan lembaga-lembaga yang memungkinkan partisipasi paling luas dari mayoritas warga negara dalam pemilihan wakil-wakil yang bisa membuat keputusan-keputusan politik sendiri, yakni keputusan yang mempengaruhi seluruh komunitas. Kumpulan undang-undang tersebut meliputi pemerintahan terpilih, pemilihan yang bebas dan jujur dimana setiap suara warga negara memiliki bobot yang sama, kemerdekaan hati nurani, informasi dan pengungkapan pikiran mengenai suatu masalah publik yang diberi batasan secara luas, hak-hak semua orang dewasa untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah dan menjadi calon pegawai dan otonomi perhimpunan hak untuk membentuk perhimpunan independen yang meliputi gerakan sosial, kelompok kepentingan dan partai politik (Held, 2004: 14).

Esensi penting di dalam sistem perwalian adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakili kepentingan-kepentingannya kepada sekelompok kecil orang itu. Proses mewakili itu dilakukan melalui pemilu yang bebas dan adil. Sekelompok kecil itu disebut wakil (*representative*) yang mewakili, dan banyak orang yang diwakili (*represented*) (Kacung, 2011: 37). Pada hakikatnya, Pemilu bebas dan adil merupakan perwujudan fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis.

Pemilu merupakan parameter negara demokratis. Agar pemilu dapat menjadi parameter demokrasi maka pemilu harus memenuhi syarat. Berbagai persyaratan pemilu yang demokratis penting karena menyangkut hakekat pemilu itu sendiri. Pertama, pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Sebaliknya, pemilu yang tidak demokratis akan melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Kedua, konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu

dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Terakhir, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir (Pamungkas, 2009: 11)

Kriteria tentang pemilu yang demokratis adalah dirumuskan oleh Butler yang menyebutkan 7 kriteria. Kriteria itu meliputi (Pamungkas, 2009: 11):

- (1) Semua orang dewasa memiliki hak suara
- (2) Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan
- (3) Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan
- (4) Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat
- (5) Administrator pemilu harus bertindak adil, tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya



- (6) Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan
- (7) Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

### 3. Teori Kepemilikan isu

Teori kepemilikan isu atau *Issue Ownership Theory* seperti yang didefinisikan oleh John Petrocik, menyatakan bahwa,

*“a campaign effect exists when a candidate successfully frames the vote choice as a decision to be made in terms of problems facing the country that he is better able to handle than his opponent”*(Jefferi, 2013: 1).

Dikutip dari tesis Jefferi C. Martin bahwa teori kepemilikan isu atau merupakan gagasan dimana partai politik memiliki kepercayaan dari masyarakat terhadap satu bidang isu tertentu berdasarkan kinerja masa lalu di wilayah isu. Kepemilikan isu adalah setiap isu yang dimiliki oleh salah satu partai secara konsisten. Kepemilikan isu, ketika pemilih mempercayai salah satu pihak atas yang lainnya terhadap isu tertentu dan pemilih yang skeptik ketika ada

pihak lain yang mencoba mempergunakan isu tersebut untuk keuntungan mereka.

**Tabel 2. Kepemilikan Isu Menurut Petrocik**

<b>Political Party</b>	<b>Issues Owned</b>
Democratic Party	Civil Rights and Liberties Social Welfare Agriculture and Farming Social Class Comparisons Labor
Republican Party	Civil and Social Order Military and Defense Policy and Spending Big Government

Isu-isu yang dimaksud seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Menurut Petrocik, Partai Demokrat memiliki masalah kesejahteraan sosial dan kebebasan, hak-hak sipil, perbandingan kelas sosial, pertanian dan tenaga kerja. Partai Republik memiliki masalah ketertiban sipil dan sosial, militer dan pertahanan dan pemerintahan besar. Terkait dengan isu kepemilikan, Petrocik(1996) mencatat bahwa kesuksesan terbesar para calon dalam kampanye yaitu disaat mereka mempergunakan setiap isu yang dimiliki

partai mereka sendiri dibanding isu yang bukan milik partai mereka (Jeffri dalamFebriani, 2016: 96).

Dalam karya klasiknya tentang Kepemilikan Isu dalam Pemilu Presiden, studi kasus 1980, Petrocik (1996) berhasil membuktikan teorinya, bahwa para calon presiden berkampanye dengan mempergunakan isu-isu yang dimiliki partai mereka. Alasannya supaya memberikan peluang keterpilihan atau keterpilihan kembali bagi calon lama. Hal tersebut secara logis menyiratkan bahwa kandidat yang paling memungkinkan menjadi pilihan pemilih yaitu kandidat yang partainya memiliki isu-isu yang telah memperoleh kepercayaan dari kelompok pemilih. Sejak pertama kali teori kepemilikan isu dikenalkan, banyak dari kalangan ahli yang menguji teori Petrocikdalam aplikasi yang berbeda-beda (Jeffri dalam Febriani, 2016: 96).

Pada awal penerapannya saat pemilu presiden, kepemilikan isu terlihat cukup persuasif. Ia memperlihatkan sebuah hubungan positif yang kuat antara “siapa yang dipercaya pemilih dalam sebuah wilayah isu” dengan “apakah calon saat pemilu akan berkomunikasi dengan masyarakat” (Febriani, 2016: 96). Kemudian teori ini

meluas ke ranah kongres, banyak ahli memperoleh bukti yang mendukung bahwa kepemilikan partai di wilayah isu mengisyaratkan tentang apakah calon kongres akan mendukung bagi pemilih. khususnya Abbeetal. (2003) menemukan bahwa secara independen, yang sangat berpengaruh bagi para calon kongres adalah menggunakan isu isu yang dimiliki partai mereka dalam menggalang dukungan (Jeffri dalam Febriani, 2016: 96).

Jadi teori kepemilikan isu adalah sebuah teori yang berbicara tentang isu-isu yang dimiliki oleh partai politik. Kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan juga menjadi salah satu akses kemenangan bagi para calon dari satu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut. Karena besarnya peran kepemilikan isu, otomatis akan besar pula upaya partai dalam memperjuangkan dan mempertahankan supaya isu yang dimiliki itu akan terus baik dan peluang bagi partai untuk selalu mendapat perhatian dari para pemilihnya (masyarakat).

#### **4. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik menurut Dahlan (1999) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai proses pengoperan lambang- lambang atau simbol- simbol komunikasi yang berisi pesan- pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2008: 35)

Menurut Mawardin komunikasi politik dapat dimengerti sebagai komunikasi berisi pesan- pesan politik yang dilakukan oleh aktor- aktor politik melalui saluran media massa yang berefek pada pembentukan serangkaian opini publik dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa politik, kekuasaan, kenegaraan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga dimaknai sebagai bagian dari cara menjalankan fungsi yang terdapat dalam sistem politik, seperti sosialisasi politik, partisipasi

politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, proses legislasi, eksekusi kebijakan, proses peradilan dan kehakiman (Mawardin, 2018: 15)

Mengutip Cangara (2009), komunikasi politik sebagai *body of knowledge* memiliki unsur- unsur yang terdiri dari sumber (*komunikator*), penerima (*komunikan*), pesan (*message*), media atau saluran dan efek.

#### 1. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka- mereka yang dapat memberi informasi tentang hal- hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, LSM dan kelompok- kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

#### 2. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,

baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang- terangan, baik didasari maupun tidak didasari yang mengandung bobot politik.

3. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan- pesan politiknya.

4. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk dukungan suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah semua kalangan masyarakat warga negara yang mempunyai hak pilih dan siswa warga negara yang akan menjadi calon pemilih dengan ketentuan cukup umur untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

5. Pengaruh dan Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai- partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini

sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sampai tingkat DPRD (Mawardin, 2018: 19)

Dari sekian banyak faktor yang membuat sukses kampanye politik, salah satu aspek yang tidak kalah penting yaitu pesan politik. Menurut Venus , pesan dalam komunikasi merupakan bagian dari keseluruhan aspek komunikasi. Suatu pesan harus dipahami dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Oleh karena itu, konstruksi pesan harus sesuai, terutama karakteristik khalayak dan efek yang diharapkan. Dengan cara demikian, suatu pesan dapat dimengerti dan diterima oleh khalayak dengan mudah (Venus, 2004: 69). Menurut Changara, pesan politik harus dikemas dengan baik agar bisa menarik perhatian orang banyak sekaligus menjadi ikon partai. Banyak isu yang diangkat secara nasional, tetapi tidak dikemas dengan baik sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Secara umum pesan- pesan politik yang masih “laku” dan menjadi jualan para politikus di negeri kita selalu seputar pendidikan



gratis, keadilan sosial, serta ekonomi kerakyatan. Semua itu sangat penting dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, persoalannya adalah pada aspek apa pesan itu ditekankan sebab pada tataran realitas, visi, misi dan programnya harus berorientasi pada skala prioritas. Artinya, dari sekian banyak hal yang penting, pasti ada yang paling penting. Pada aspek yang paling penting itulah kemudian pesan politik bisa lebih ditekankan (Changara, 2009: 340)

Untuk menetapkan pesan politik, Tabroni menjelaskan, tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Pesan politik harus dirumuskan secara bersama-sama oleh para elite politik melalui sebuah mekanisme musyawarah yang sangat serius. Pesan politik tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, tetapi oleh seorang atau beberapa orang ahli yang sangat paham mengenai persoalan publik sekaligus orang yang dapat merumuskan berbagai inovator berpikir. Semua materi pesan politik dapat diambil dari kondisi masyarakat sendiri. Dengan proses komunikasi yang dilakukan secara timbal balik, para politikus akan mendapat banyak informasi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjadi bahan

kebijakan kemudian dirumuskan menjadi sebuah program kerja (Tabroni, 2012: 32)

Pesan politik sebenarnya bisa diangkat dari berbagai persoalan yang ada di lapangan. Untuk menghadapi tuntutan dan berbagai problem yang ada, formula ini menjadi penting. Dengan demikian, pesan politik menjadi lebih fungsional dan aplikatif, sesuai dengan kepentingan publik. Penyampaian pesan politik dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

1. Menggunakan bahasa yang padat dan dapat dimengerti.
2. Mengangkat isu- isu aktual dan segar.
3. Mencari sebuah slogan yang populer sehingga dapat diingat dengan mudah oleh publik.
4. Menyampaikan program dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat.
5. Menarik perhatian khalayak dan menjadi motivasi bagi masyarakat banyak.
6. Menjelaskan semua yang disampaikan menjadi sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh diri dan kelompoknya (Tabroni, 2015: 66).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai strategi kampanye caleg PSI untuk memenangkan pemilihan legislatif di kota Semarang 2019. Pendekatan dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi kampanye calon legislatif partai Solidaritas pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Semarang.

Penelitian kualitatif yakni penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai instrumen kunci (Sugiono, 2015: 8). Sementara itu menurut Ludico, Spaulding, dan Voegtle (2016) penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting

pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*) (Emzir, 2012: 2).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus- kasus khusus yang terjadi pada objek analisis (Bugin, 2014: 237). penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan),

dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2014: 135).

## **2. Definisi Konseptual**

- a. Partai Politik adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun (Surbakti, 2010: 148).
- b. Pemilihan Umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan- jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2009: 3).
- c. Strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan inteligensi/ pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien (Marthin-Anderson 1968 dalam Cangara, 2016: 252)

- d. Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu kepada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Rogers dan Storey dalam Venus, 2018: 9)
- e. Calon Legislatif adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap (Uber, 2016: 3).
- f. Isu Politik adalah pengungkapan data dan informasi tentang isu sosial, isu sosial hanya bisa menjadi isu politik ketika isu sosialnya dikaitkan dengan implementasi kekuasaan partai yang berkuasa. Pengungkapan masalah sosial tanpa disertai muatan politis belum dapat diklasifikasikan sebagai isu politik (Firmanzah, 2008: 121).

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sesuai dengan objek penelitian pada skripsi ini maka data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung dan melemahkannya (Andi, 2016: 31). Data primer yang diperoleh adalah ketua DPD PSI Kota Semarang, dan caleg PSI yang lolos menjadi DPRD Kota Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif (Andi, 2016: 32). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh sumber data sekunder. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, surat kabar, majalah, arsip, dokumen resmi

dan catatan- catatan yang berkaitan dengan strategi kampanye Caleg PSI pada Pemilu 2019.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan upaya sistematis dalam rangka memperoleh sumber data yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna memperoleh data yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **a. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) (Sutinah, 2005: 69). Pada tahapan awal



informan ditentukan secara *purposive* dalam pengembangannya bisa menggunakan *snowball sampling*, sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap. Prosedur *purposive* yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bugin, 2014:107).Prosedur Snowball sering digunakan untuk mencari dan merekrut “informan tersembunyi,” yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya (Bugin, 2014: 108 ).

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mengalami proses atau terlibat dalam pembentukan strategi kampanye Caleg PSI di Kota Semarang, yaitu Ferdian Fajar yang merupakan ketua DPD PSI Kota Semarang. Calon legislatif terpilih yaitu, Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara. Tim sukses dari Caleg Partai Solidaritas Indonesia dan masyarakat Kota Semarang.

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 231). Pada penelitian ini teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan atau arsip yang berkaitan dengan pemilu legislatif 2019.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah menemukan data di lapangan peneliti perlu menjelaskan teknik analisis data yang digunakan. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu “ digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan- pisahkan menurut katogori untuk diambil suatu kesimpulan” (Nawawi, 1998: 133). Analisis data teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verikasi data) (Sugiyono, 2016: 246).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menonjol, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data

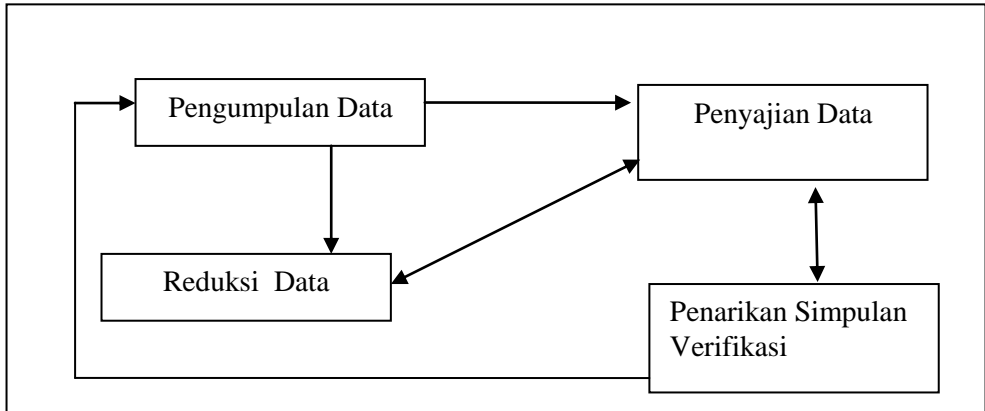
kualitatif dan menentukan jenis bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik.

d. Verifikasi Data

Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat diartikan sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitas. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfirmasi yang utuh. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai tinjauan ulang terhadap hasil penelitian di lapangan. Keempat alur di atas, bila digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut.

Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif:

**Gambar 1. Analisis Data Kualitatif**



(Sumber : Sugiyono, 2016: 248)

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan akan disusun menjadi tiga bagian dan tersusun menjadi lima bab, adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

F. Kerangka Teori

1. Demokrasi Elektoral
2. Kepemilikan Isu
3. Komunikasi Politik

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
2. Definisi konseptual
3. Sumber dan Jenis Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Analisis Data

H. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II MESIN, SALURAN DAN ISU KAMPANYE

A. Mesin Kampanye

B. Saluran Kampanye

1. Saluran Kampanye Melly Pangestu
2. Saluran Kampanye Benediktus Narendra Keswara

C. Isu Partai Solidaritas Indonesia

1. Isu Politik
2. Isu Kampanye PSI

## BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

B. Profil Partai Solidaritas Indonesia

1. Sejarah Berdirinya PSI
2. Lambang PSI
3. AD ART PSI
4. Visi Misi PSI

5. Syarat Menjadi Kader dan Pengurus PSI
  6. Struktur Kepengurusan PSI
  7. Perbedaan PSI dengan Partai Lain
- C. Potret Kandidat
- D. Dinamika Pemilihan Legislatif Kota Semarang
1. Pemilihan Legislatif Kota Semarang 2019
  2. Sistem Pemilihan Legislatif 2019
  3. Hasil Pemilihan Kota Semarang Legislatif 2019
  4. Partisipasi Pemilih Kota Semarang dalam Pemilu 2019

#### BAB IV STRATEGI KAMPANYE DAN FAKTOR PENGARUHNYA

- A. Strategi Kampanye Politik Caleg PSI
1. Kepemilikan isu
  2. Komunikasi Politik
- B. Faktor Pendukung Kemenangan Caleg PSI
- C. Faktor Penghambat Strategi Caleg PSI
- D. Implikasi Teori
- E. Model Strategi Kampanye Caleg PSI

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **MESIN POLITIK , SALURAN DAN ISU KAMPANYE CALEG PSI**

#### **A. Mesin Politik**

Partai politik dikenal sebagai organisasi politik dalam mendulang suara pada pemilihan legislatif, dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi sebagai mesin politik. Mesin partai politik partai harus dihidupkan menjelang pemilihan, agar anggota dan simpatisan partai politik menjadi suara dasar. Namun tidak selamanya mesin politik partai berjalan dengan baik. Contohnya mesin politik yang di gunakan oleh caleg PSI Kota Semarang. Mesin kampanye caleg PSI secara umum hampir sama yaitu masih bersifat klasik. Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara menggunakan keluarga, teman dan kerabat sebagai mesin politik untuk mendulang suara. Keduanya sama- sama tidak mempunyai tim kampanye yang mapan dan terorganisir. Orang yang sangat berperan dalam membantu proses pelaksanaan kampanye adalah keluarga dan teman dekat. Selain itu, Melly menegaskan menggunakan mesin politik keluarga dan teman dekat adalah pilihan yang



tepat karena tidak ada kontrak politik. Melly dalam wawancara mengatakan :

“Tidak ada tim sukses, hanya saya sendiri, paling mentok ngajak adik saya. Jadi kita berdua atau teman-teman yang lain gak ada yang namanya tim sukses. Kita jalan sendiri, naik montor sendiri, pagi naik montor, tengah malem naik montor. Tim sukses kita paling keluarga kita saja yang terdekat, bantuin ngomong ya kesana kesini udah itu saja.” (Wawancara Melly, Semarang 1 Agustus 2019)

Hal yang sama dilakukan oleh Benediktus Narendra Keswara. Dia menggunakan keluarga , teman dekat, kerabat, sanak- saudara dan tetangga sebagai mesin kampanye. Dalam wawancara dia menyatakan:

“Iya, saya dibantu keluarga dan teman-teman dekat saya, Tidak ada tim kampanye. “(Wawancara Benediktus, Semarang 23 September 2019)

Dengan memahami mesin politik yang dipakai Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara dapat disimpulkan bahwa keduanya menggunakan institusi tradisional (keluarga, kerabat, saudara, teman dekat, organisasi yang diikuti) sebagai mesin pendulang suara. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa PSI sebagai partai yang baru terbentuk, dan belum memiliki institusionalisasi yang mapan secara struktural hingga ke

tingkat lokal. PSI sebagai partai baru belum mempunyai mesin politik yang lebih produktif di akar rumput.

Ferdinan fajar sebagai caleg dari dapil 5 (Ngaliayn, Tugu dan Mijen) yang menjabat sebagai ketua DPD PSI Kota Semarang mempunyai mesin politik berupa jaringan relawan gabungan. Jaringan relawan gabungan yang dimaksud adalah tim sukses DPR RI dan merangkap sebagai tim sukses DPRD Kota/ Kabupaten. Jadi satu tim sukses yang terdiri dari 19 orang ditugaskan mengkampanyekan 1 caleg DPR RI dan 1 caleg DPRD Kota. Ferdinan Fajar dalam wawancara menjelaskan :

“Tim sukses dari caleg DPR RI, jadi untuk yang kota khususnya itu hanya melengkapi. Jadi tim suksesnya temen-temen dari DPR RI digabungkan jadi satu jadi posnya lebih kecil. Artinya untuk kampanye penyebaran atribut itu disebar dari pada kita harus ke kota lain DPR RI lain jadi kita satukan biar jadi satu relawan itu bisa nyebar 2 atau 3 caleg.” (Wawancara Ferdian, Semarang 30 Juli 2019)

Jaringan relawan gabungan hanya dimiliki dan digunakan secara optimal oleh caleg PSI yang berada di dalam *inner circle* yang merupakan pengurus internal partai. Dalam hal ini, tim sukses Ferdinan Fajar digabung dengan tim sukses Dini

Shanti Purwono yang merupakan caleg dari DPR RI Jateng 1(Semarang, Kab. Semarang, Kendal dan Salatiga).

## **B. Saluran Kampanye Politik Caleg PSI**

Menurut Venus, Kampanye pada prinsipnya merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi khalayak sasaran melalui pesan- pesan yang disampaikan dalam beragam saluran komunikasi. Sampai- tidaknya atau dipahami- tidaknya pesan tersebut oleh khalayak sangat dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan pesan (Venus, 2012: 139). Menurut Klingemann dan Rommele saluran kampanye sebagai segala bentuk medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Secara umum, saluran kampanye yang ada dapat dikelompokan ke dalam saluran langsung (*nonmediated*), saluran tidak langsung dan saluran bermedia (*mediated*) (Venus, 2018: 140). Memilih saluran kampanye yang tepat, sangat penting agar pesan-pesan yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kegiatan kampanye caleg-caleg PSI dilakukan dengan berbagai macam saluran. Berangkat dari kemenangan dua caleg PSI di DPRD Kota Semarang, berikut saluran yang digunakan di dalam proses kampanye.

## **1. Saluran Kampanye Melly Pangestu**

Pertama, saluran kampanye tidak langsung, yang digunakan Melly Pangestu yaitu pembagian stiker, pemasangan spanduk dan baligo. Pemasangan baligo di sejumlah tempat dilakukan mulai dari hari pertama saat masa kampanye ditetapkan. Atribut kampanye-kampanye tersebut menampilkan foto Melly Pangestu yang mengenakan jaket PSI berwarna merah. Foto tersebut berusaha menampilkan sosok perempuan berjiwa muda dan tangguh yang berani melawan korupsi dan siap mewujudkan harapan baru masyarakat kota Semarang. Di dalam atribut kampanye terdapat pesan politik berbunyi “Semarang keren, maju kotane, makmur wargane”. Contoh baligo kampanye dari caleg Melly Pangestu dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2.  
Baligo Caleg Melly Pangestu



Gambar 3.  
Baligo Caleg Melly Pangestu di Daerah Semarang Tengah



Sumber : *Data Sekunder*

Kedua, saluran kampanye langsung. Saluran kampanye langsung yang dilakukan tersusun dalam beberapa kegiatan- kegiatan kampanye. (1) Kampanye *door to door* ke rumah- rumah warga. Kampanye tersebut, dilakukan secara terus-menerus bahkan bisa dari pagi hari sampai malam hari. Menurut Melly Pangestu, dengan melakukan kunjungan dan berdialog langsung dengan masyarakat sangat berguna untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. (2) Kampanye sosialisasi perkenalan. Acara sosialisasi perkenalan diadakan dengan

agenda mengundang seluruh masyarakat Kota Semarang untuk bertatap muka dengan caleg PSI. Acara tersebut diadakan pada tanggal 8 April 2019 yang bertempat di Gues House Legenda. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 orang. (3) Senam bersama masyarakat di acara *car free day* di simpang lima Semarang. Senam bersama masyarakat tersebut dilakukan secara rutin setiap hari minggu di bulan-bulan menjelang pemilihan umum. (4) *meet up* bersama masyarakat. Meet up tersebut dilakukan di tempat- tempat umum setiap saat ketika memiliki waktu luang, seperti di mall, cafe dan warung makan. Melly Pangestu menjelaskan dalam wawancara :

“Kadang saya hanya memunculkan status di media sosial dan status *whatapp*, jam sekian saya ada di sini *meet up* ya, siapa yang bisa datang silakan datang”(Wawancara Melly, Semarang 23 September 2019).

Dari situ Melly Pangestu bisa berbicara santai dan menangkap permasalahan-permasalahan sosial dan hal- hal yang diinginkan masyarakat. Menurutnya kampanye yang dia lakukan tidak hanya berkampanye secara pribadi saja tapi lebih ke pendidikan politik. Pendidikan politik yang dimaksud adalah mempraktekan politik yang bersih dan

jujur tanpa menggunakan politik uang. Dalam konteks komunikasi politik saluran kampanye yang digunakan Melly sudah mencerminkan terjadinya komunikasi dua arah arah calon pemimpin dengan yang dipimpin. Dengan begitu, pesan- pesan politik yang disampaikan kepada khalayak dapat terpresentasikan dengan baik.

Gambar 4.  
Kampanye di acara CFD Simpang  
Lima Semarang



Gambar 5.  
*Meet Up* di Sebuah Cafe



Sumber : *Data Sekunder*

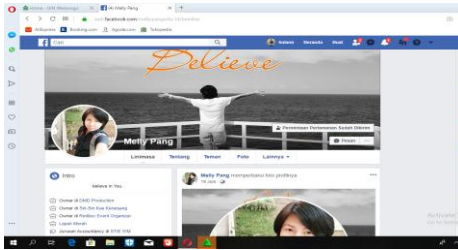
Gambar 6.  
Kampanye Sosialisasi Perkenalan



Gambar 7.  
Kunjungan ke Pedagang Kaki Lima



Gambar 8.  
Akun Facebook Melly Pangestu



Sumber : *Data Sekunder*

Sumber : *Data Sekunder*

Ketiga, saluran kampanye bermedia yang dilakukan Melly Pangestu yaitu dengan menggunakan media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan *instagram*. Saluran media massa seperti radio, majalah atau surat kabar, tidak digunakan sebagai saluran kampanye karena tidak begitu efektif untuk menjaring dukungan selain itu biayanya juga mahal. Melly Pangestu lebih fokus untuk menggarap *facebook* sebagai saluran kampanye di media sosial. Akun *Facebook* dari Melly Pangestu memiliki jumlah teman kurang lebih 4500 akun. Melalui jejaring sosial tersebut, Melly sering membagikan kegiatan- kegiatan kampanye



yang dia lakukan. Dalam wawancara Melly Pangestu mengatakan :

“*Facebook* terutama ini sangat membantu, jadi *facebook* saya pasang *fanpage* mulai dari situ banyak yang bergabung dan banyak yang inbox”(Melly, 23 September 2019).

*Fanpage* adalah sebuah halaman khusus layaknya blog yang menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan keinginan pemiliknya.

## **2. Saluran Kampanye Benediktus Narendra Keswara**

Pertama, saluran kampanye tidak langsung yang digunakan oleh Benediktus Narendra Keswara yaitu dengan pembagian kartu nama. Dalam pembagian kartu nama Benediktus menggunakan strategi *Multi Level Marketing* (MLM). Benediktus juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan spanduk, baligo dan bentuk saluran kampanye tidak langsung lainnya dalam proses kampanye. Dalam wawancara Benediktus mengatakan :

“Saya tidak buat spanduk, cuma cetak kartu nama. Ini saya bilang apa adanya”(Benediktus, 23 September 2019).

Sedangkan untuk saluran langsung yaitu dengan mengutamakan kegiatan *door to door* mendatangi rumah-rumah warga. Kegiatan tersebut dipilih memudahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat menyampaikan visi, misi, tujuan partai dan program kerja. Untuk program kerja yang ditawarkan Benediktus adalah mengatasi permasalahan banjir, kesehatan dan pendidikan. Contoh stiker dan kartu nama yang dibagikan oleh Benediktus dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 9.  
Stiker



Gambar 10.  
Kartu Nama



Sumber : *Data Sekunder*

Atribut kampanye tersebut menampilkan foto Benediktus yang menggunakan jaket PSI berwarna merah, di dalam atribut juga terdapat slogan “sama-sama bangun bangsa”. Untuk saluran bermedia yang digunakan selama kampanye

adalah melalui media sosial yaitu *Whatsapp, Instagram dan facebook*.

### **C. Isu Kampanye Partai Solidaritas Indonesia**

PSI sebagai partai yang baru berkipra di pemilihan umum 2019, memberi warna berbeda dalam perpolitikan di Indonesia. PSI hadir dengan mengangkat isu- isu kepartaian yang lebih substantif. Isu- isu kepartaian adalah isu- isu yang dimiliki atau diangkat oleh partai politik dan masyarakat percaya bahwa partai tersebut secara konsisten bisa menyelesaikan isu tersebut. Mengutip teori kepemilikan isu dari Petrocik, bahwa kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan juga menjadi salah satu akses kemenangan bagi para calon dari suatu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut. Isu yang diangkat, ditawarkan dan diperjuangkan partai politik menjadi penting dan menentukan keberhasilan partai politik terhadap konstituennya. Sebelum membahas lebih jauh tentang isu-isu politik partai Solidaritas Indonesia, perlu untuk mengetahui dulu apa itu isu politik.

## 1. Isu Politik

Isu politik berbeda dengan *platform* partai. *Platform* berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara (Firmanzah, 2008: 119). Sedangkan isu politik harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Partai politik harus bisa menangkap masalah-masalah terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan seputar, kekecewaan, kegusaran dan rasa frustrasi yang ada, harus dapat ditangkap oleh partai politik, kemudian dituangkan dalam isu politik. Dalam hal ini, pengungkapan data dan informasi tentang isu sosial hanya bisa menjadi isu politik ketika isu sosialnya dikaitkan dengan implementasi kekuasaan partai yang berkuasa. Pengungkapan masalah sosial tanpa disertai muatan politis belum dapat diklasifikasikan sebagai isu politik (Firmanzah, 2008: 121).

Menurut Soemarno, *Political issue* tidak akan menjamin untuk mencapai keberhasilan pemilihan umum

apabila isu politik yang digunakan sebagai tema kampanye, tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan para pemilih. Isu yang langsung mempengaruhi calon pemilih (*voter's*) yaitu isu yang berkaitan dengan, (1) Kepentingan para pemilih, (2) Harapan pemilih di masa datang, (3) Peningkatan derajat para pemilih, (4) Kehidupan sehari-hari (Soemarno, 2017: 49). Penting mengetahui bahwa isu politik yang diangkat akan menentukan *positioning* pesaing (Firmanzah, 2008: 247). Misalnya, ketika suatu partai politik atau kandidat mengangkat isu tentang perempuan, masyarakat dapat melihat kepedulian partai atau kandidat tersebut terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perempuan. Akibatnya ketika ada sebuah partai atau kandidat lain yang mencoba mengangkat isu tersebut, justru akan merugikan partai atau kandidat itu sendiri. Untuk itu sangat penting, mencari isu-isu yang belum diangkat oleh pihak lain.

## **2. Isu- Isu Partai Solidaritas Indonesia**

Persaingan politik mengkrystal pada seberapa bagus kemampuan partai-partai politik dalam mengangkat dan menciptakan suatu isu politik yang kredibel dan berkualitas.

Isu politik yang kredibel adalah isu politik yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan bukti- bukti empiris dan merupakan hasil dari analisis mendalam atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terkesan bahwa isu politik yang dimunculkan sekedar rumor politik yang tidak berdasarkan suatu bukti dan hanya berdasarkan dugaan. Sementara itu isu politik juga harus berkualitas. Artinya, isu tersebut merupakan representasi yang kuat atas kondisi real masyarakat. Semakin tinggi representasinya, isu politik itu semakin mencerminkan kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat. Isu politik dapat berupa permasalahan dalam ekonomi, sosial-budaya, stabilitas nasional, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki pengaruh serta dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan- permasalahan tersebut harus memiliki implikasi terhadap institusi yang mengatur dan menetapkan kebijakan (Firmanzah, 2018: 286).

Dalam konteks kampanye politik, Lynn menyatakan bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Khalayak harus membuat pilihan antara anda atau calon lain (Venus, 2012: 107). Perlu adanya pembedaan yang tegas antara seorang

calon dengan calon yang lain. Jika semua kandidat berbicara tentang isu yang sama, tentu khalayak atau pemilih tidak tau pasti siapa yang harus dipilih. PSI menyatakan sikap terhadap isu-isu politik secara jelas, sehingga dapat terlihat perbedaan sikap terhadap partai lain. Contohnya, PSI mendukung proses pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sementara PKS menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Isu politik yang digunakan dalam memobilisasi dukungan tidak hanya berlaku pada masa kampanye, namun terus berlanjut sampai terbentuknya sebuah pemerintahan hasil pemilu dan menentukan arah kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahan tersebut. Isu strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi pertimbangan penting masyarakat untuk menentukan pilihan politik (Rakhmah, 2014: 583). Adapun isu- isu yang dimiliki partai Solidaritas Indonesia antara lain. Pertama, isu tentang partainya anak muda. Kedua, isu tentang partainya perempuan yang mengakat permasalahan seputar perempuan yakni pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan seksual, menolak poligami dan menaikkan batas minimal usia menikah untuk perempuan. Ketiga, isu tentang

toleransi yang mengangkat isu mengenai penolakan Peraturan Daerah yang berlandaskan agama. Keempat, isu tentang anti korupsi.

**a. Partainya Anak Muda**

Partainya anak muda. PSI mengklaim sebagai partai yang identik dengan anak muda. Label sebagai partainya anak muda, menurut PSI telah diwujudkan diantaranya melalui rekrutmen kadernya adalah aktivis muda berusia di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahunan. Cara ini dilakukan PSI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda bangsa untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa (Tim PSI, 2015:6). Banyaknya tokoh-tokoh generasi muda yang bergabung didalamnya antara lain, Tsamara Amany, Giring Ganesha atau Giring “Nidji”, Muhammad Guntur Romli (Aktivis Nadhatul Ulama) dan Hariyanto Arbi (Atlet Bulutangkis). Sebagai partai yang identik dengan kaum muda, PSI mencoba hadir dengan merubah citra politik menjadi lebih cair dan santai. Salah satunya adalah dengan menggunakan panggilan sapaan Bro dan Sis.



Bro dan Sis merupakan singkatan dari *Brother* dan *Sister*, Bro untuk laki-laki dan Sis untuk perempuan. Selain itu, dalam mendekati kaum muda salah satu strategi PSI adalah memanfaatkan media sosial sebagai alat memperkenalkan program partai, program caleg serta menjawab isu-isu strategis.

Jumlah pemilih pemula dan kaum muda pada pemilu 2019 mencapai kisaran 14 juta. Jumlah yang banyak tersebut tentu bisa menjadi penentu kemenangan (Sucianingsih, 2018). Kaum muda adalah individu dengan karakter dinamis bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Rentang usia kaum muda dibedakan dalam beberapa kategori secara Biologis yakni berusia 12-15 tahun (Remaja) dan 15-30 tahun (Pemuda) dan secara Idiologi Politik yakni generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun (Zulkifli, 2009: 64). Partai Solidaritas Indonesia menginginkan basis massa dari kaum muda. Namun basis massa PSI yang disebut dengan “kaum muda” juga terkesan mengandung pengertian yang monolitik dan karena itu terutama mengabaikan keberagaman

kelas sosialnya (Mudhoffir, 2018). Sebagai contoh pandangan politik kaum muda dari kelas menengah ke atas tidak bisa disamakan dengan kaum muda dari kelas bawah. Basis massa yang didefinisikan sebagai kaum muda, selain lintas kelas tentu juga sangat cair dan karena itu tidak bisa menjadi kekuatan politik terorganisir yang dapat mengontrol kinerja partai, lembaga legislatif maupun pemerintah (Mudhofir, 2018).

**b. Partainya Perempuan**

Partainya perempuan menjadi salah satu jargon unggulan PSI. Selama ini, keterwakilan perempuan belum menjadi isu yang dimiliki sebuah partai politik. Isu ini hanya diperjuangkan oleh sejumlah pegiat (aktivis) politik perempuan di dalam maupun di luar partai dan parlemen, tetapi tidak menjadi concern-nya sebuah partai (Febriani, 2016:96). Partai solidaritas hadir dengan isu- isu sensitif tentang permasalahan perempuan yang jarang disinggung partai lain. Partai berlogo bunga mawar ini sangat progresif dengan pelibatan perempuan dalam politik praktis. PSI mengidealkan 40 persen pengurus partai adalah

perempuan, bahkan 70 persen pengurus pusat partai adalah perempuan.

PSI mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS lahir akibat kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin meningkat, kasus tersebut belum tertangani dengan baik sehingga perlu adanya payung hukum untuk melindungi para korban kekerasan seksual. RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) DPR pada tahun 2016. Namun hingga tahun 2019 RUU PKS masih mangkrak dan belum disahkan oleh DPR, tentu komitmen wakil rakyat pada jutaan korban kekerasan seksual di Indonesia patut dipertanyakan. Ketua Umum partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie mengatakan PSI mendorong RUU PKS agar segera disahkan karena urgensinya sangat penting (Hardi, 2019). Bertolak belakang dengan PSI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menolak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual karena isinya bersifat liberal (Kompas, 2019)

PSI juga sangat gencar menolak poligami. PSI beranggapan praktik poligami merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan. Larangan poligami bagi kader, pengurus dan Caleg PSI sudah diterapkan. PSI juga menawarkan kebijakan larangan poligami bagi pejabat publik. Selain isu tentang poligami, PSI juga mendukung putusan MK soal usia perkawinan perempuan di Indonesia dinaikkan, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi minimal 18 tahun. Keputusan MK diambil atas pertimbangan bahwa pasal tersebut bersifat diskriminasi dan timpang- tindih dengan kebijakan lainnya (Alaidrus, 2018). Batas usia minimal perempuan menikah dalam UU perkawinan dinilai tidak sejalan dengan kebijakan wajib belajar dua belas tahun dan UU Perlindungan Anak. Grace Natalie mengatakan, jika perempuan menikah dibawah 18 tahun, maka ia akan kehilangan hak- haknya sebagai anak, termasuk hak pendidikan dan hak dilindungi dari kekerasan (Kompas, 2018).

### c. **Toleransi**

Toleransi dan keberagaman juga merupakan salah satu tujuan partai ini. Toleransi adalah sebuah cita-cita etis sekaligus prinsip sosial. Di satu sisi, toleransi merepresentasikan tujuan otonomi personal, tetapi di sisi lain toleransi meletakkan serangkaian aturan tentang bagaimana manusia harus saling berinteraksi. Sedangkan Intoleransi sangat jelas mengacu pada sikap tidak mau menerima tindakan-tindakan, pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan orang lain. Bukan hanya ada ketidaksetujuan moral atau ketidaksukaan semata, tetapi juga ada semacam upaya untuk memaksakan larangan-larangan atau hambatan-hambatan terhadap orang atau pihak lain (Heywood, 2018: 441).

PSI adalah partai yang terbuka (inklusif dan pluralis) bagi seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras. Spirit inklusivitas dan pluralitas PSI juga tergambar dari pola rekrutmen kader PSI yang akan mengabdikan diri di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan mengedepankan kriteria objektifrasional ketimbang kriteria primordial berbasis

kesukuan atau kagamaan (Tim PSI, 2015:6). Salah satu bukti nyata yang diambil partai ini dalam hal toleransi, yaitu menolak Peraturan Daerah yang berlandaskan agama. Grace Natalie mengungkapkan PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah (CNN, 2018). Menurut PSI, adanya Perda syariah dan Perda Injil adalah wujud dari ketidakadilan antara mayoritas terhadap minoritas yang tentunya bertolak belakang dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila.

#### **d. Anti Korupsi**

Isu yang paling dinikmati oleh para aktivis PSI yaitu komitmennya sebagai partai yang anti korupsi. Ketua umum Grace Natalie mengatakan komitmen utama partainya adalah melawan korupsi. Bagi PSI, salah satu akar permasalahan korupsi adalah proses rekrutmen yang tertutup, eksklusif dan nepotis (PSI, 2018). Proses rekrutmen PSI dilaksanakan secara terbuka, ini adalah salah satu langkah PSI untuk menghilangkan akar permasalahan korupsi. Selain itu, menurut salah satu syarat menjadi pengurus dan

anggota PSI adalah orang-orang yang belum pernah menjadi kader partai politik lain. Hal ini, dilakukan PSI untuk memutus mata-rantai dan tradisi buruk partai-partai politik lama.

Maraknya kasus korupsi juga telah menunjukkan kepada kita bahwa betapa tidak sehatnya kondisi keuangan partai politik di negara ini. Pada sebuah partai politik, tersedianya sumber dana yang banyak dan lancar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana untuk tetap *survived* di arena politik. Permasalahan yang menyangkut *fundraising* (pengumpulan dana) merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam permasalahan korupsi yang dihadapi oleh partai politik (Labolo, 2015: 200). Untuk itu PSI memiliki sebuah program bernama Kartu Sakti. Kartu SAKTI sendiri merupakan kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi. Kartu Sakti diberikan kepada setiap orang yang mendonasikan sejumlah dana iuran anggota secara rutin.

Melalui kartu ini publik bisa ikut menyumbang untuk PSI. Besaran sumbangan yang diberikan mulai

dari Rp. 25.000, hingga Rp. 1.000.000.000 per tahunnya. Kartu tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan PSI yang bersifat online maupun offline selain itu para donatur juga punya hak untuk menentukan arah kebijakan partai dan mengawasi kader PSI yang duduk sebagai wakil rakyat (Nadir, 2018). Donasi publik tersebut dinilai penting, untuk menghindari penguasaan partai atas seseorang atau kelompok, bahkan keluarga. Selain itu, Peter Mair dan Daniel Katz yang dikutip oleh Labobo menjelaskan ketidakmampuan partai-partai untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaannya yang berasal dari iuran anggota ataupun masyarakat yang menjadi basis sosialnya akan memunculkan partai kartel (Labobo, 2015: 204). Kartu SAKTI adalah wujud keseriusan PSI dalam pemberantasan korupsi.

### **3. Isu Politik PSI dan Agenda Politik PSI**

Berbeda dengan isu politik, agenda politik merupakan rancangan kerja atau program partai politik yang sifatnya lebih riil dari isu politik (Labobo, 2015: 229).



Rancangan kerja tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal. Agenda politik dapat bersifat internal artinya bagaimana partai politik memberdayakan dan membina organisasi dan para kadernya membutuhkan suatu perencanaan terpadu (Firmanzah, 2008: 286). Sementara itu, agenda politik secara eksternal, bagian Litbang juga harus merancang agenda politik untuk lebih meyakinkan masyarakat karena isu politik yang digembar- gemborkan saja tidak cukup. Penyusunan agenda politik untuk tujuan eksternal ini tidak kalah pentingnya. Masyarakat yang semakin kritis tentunya akan melihat agenda politik dari partai manakah yang bagus dan tepat sasaran. Oleh karena itu, agar dapat menarik hati rakyat, Litbang harus menyusun agenda politik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat (Labobo, 2015: 30). Berikut ini adalah isu politik dan agenda politik partai Solidaritas Indonesia.

**Tabel 12. Isu politik dan Agenda Politik PSI**

No	Isu Politik PSI	Isu Sosial	Agenda Politik PSI
1	Partainya Anak Muda	Rendahnya minat anak muda Indonesia, untuk terjun ke dunia politik. Praktik korupsi dan tindak tanduk politik lama membuat publik apalagi anak muda apatis untuk bergabung dengan partai politik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSI adalah partai baru yang dikelola aktis muda berusia di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahunan (Tim PSI, 2015)</li> <li>2. PSI akan memperjuangkan penghapusan pajak penghasilan bagi para pekerja awal karir dan keluarga muda yang berpenghasilan di bawah Rp 15 juta (Paat, 2019).</li> <li>3. PSI akan memperjuangkan internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa untuk keperluan pendidikan (Paat, 2019).</li> <li>4. PSI akan</li> </ol>

			<p>memperjuangkan alokasi dana beasiswa untuk meningkatkan keahlian anak muda (Paat, 2019).</p> <p>5. PSI akan mendorong pengakuan atas profesi baru seperti Youtuber, Influencer, Gamer dan lain-lain agar bisa dicantumkan dalam kolom profesi KTP (Paat, 2019).</p>
--	--	--	--

2	Partainya Perempuan	<p>Masalah nasional hari ini adalah masih dilanggengkannya ketidakadilan gender, karena sudah begitu lama terjadi, sebagian kita mungkin menerimanya sebagai sebuah kewajaran. Kita tidak bisa menutup mata, masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya, masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan bidang ekonomi. Masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak. (Tim PSI, 2015: 25).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSI mengidealkan 40 persen pengurus partai adalah perempuan, bahkan 70 persen pengurus pusat partai adalah perempuan.</li> <li>2. PSI mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).</li> <li>3. PSI gencar menolak poligami. Larangan poligami bagi kader, pengurus dan Caleg PSI sudah diterapkan.</li> <li>4. PSI mendukung putusan MK soal usia perkawinan perempuan di Indonesia dinaikkan, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi minimal 18 tahun.</li> </ol>
---	---------------------	--	--

3	Toleransi	<p>Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa politik identitas atau isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) jadi faktor tertinggi yang diprediksi akan menghambat gelaran Pemilu 2019. Rendahnya toleransi dipandang terkait dengan isu ini (Ayuwuragil, 2018).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSI terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat perundangundangan partai politik. Terbuka untuk seluruh latar belakang etnis, agama, suku, ras, keyakinan, gender dan latar belakang sosial lainnya. Berpandangan terbuka, tidak sektarian dan eksklusif (Tim PSI, 2015: 11)</li> <li>2. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah (CNN, 2018).</li> </ol>
4	Anti Korupsi	<p>Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik yang berasal dari kalangan legislatif (DPR, DPRD</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat menjadi pengurus dan anggota PSI adalah orang-orang yang belum pernah menjadi kader partai politik lain.</li> <li>2. PSI tidak merekrut</li> </ol>

		Provinsi maupaun DPRD Kota/ Kabupaten) ataupun kalangan eksekutif (presiden, menteri, gubernur dan bupati/ walikota) sudah sering terjadi di Indonesia.	mantan napi Korupsi. 3. Kartu SAKTI (solidaritas anti korupsi dan intoleransi)
--	--	--	---

Sumber : *Data Sekunder*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Semarang**

Semarang merupakan Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Di batasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara di batasi oleh Laut Jawa. Secara Administratif pemerintahan Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan yaitu Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu dan Ngaliyan. Selain itu Kota Semarang terdiri dari 177 Kelurahan. Kecamatan Mijen dan Gunungpati merupakan 2 Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, yakni  $57,55 \text{ km}^2$  dan  $54,11 \text{ km}^2$ . Sedangkan Kecamatan Semarang Selatan dan

Kecamatan Semarang Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yakni 5,93 km<sup>2</sup> dan 6,14 km<sup>2</sup>.

Dari segi demografi, berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 mengenai jumlah penduduk kota semarang sebanyak 1.668.578 terdiri dari laki-laki 825.964 jiwa dan perempuan 842. 614 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk Kota Semarang menurut sebaran per kecamatan tahun 2017 sebagaimana di sampaikan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu jumlah penduduk laki-laki 858.964 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 894.128 jiwa.



**Tabel 3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan  
Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	Mijen	35.271	35.618	70.889
2	Gunungpati	43.772	44.974	88.746
3	Banyumanik	71.137	75.595	146.732
4	Gajah Mungkur	34.299	35.211	69.510
5	Semarang Selatan	41.536	43.920	85.456
6	Candisari	41.854	43.798	85.652
7	Tembalang	87.580	88.152	175.732
8	Pedurungan	97.025	102.128	199.153
9	Genuk	54.909	55.646	110.556
10	Gayamsari	40.176	40.575	80.751
11	Semarang Timur	40.327	42.541	82.867
12	Semarang Utara	65.911	71.865	137.776
13	Semarang Tengah	36.188	38.766	74.959
14	Semarang Barat	83.877	87.438	171.315
15	Tugu	17.234	17.789	35.023
16	Ngaliyan	67.868	70.113	137.980
	<b>Jumlah</b>	<b>858.964</b>	<b>894.128</b>	<b>1.753.092</b>

(Sumber: BPS Kota Semarang)

Sedangkan berdasarkan laporan BPS Kota Semarang mengenai kategori pekerjaan penduduk Kota Semarang, pengkategorian jenis pekerjaan ini dibagi menjadi sepuluh item. Untuk jumlah paling besar terdapat pada buruh industri yang mencapai 180.652 jiwa. Sedangkan yang

terendah adalah nelayan mencapai 2.718 jiwa(Erisman, 2018:90).

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kota Semarang**

**Tahun 2016**

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani Sendiri	27.572	3,92 %
Buruh Tani	18.971	2,30 %
Nelayan	2.718	0,39 %
Pengusaha	54.412	7,72 %
Buruh Industri	180.652	25,6 %
Buruh Bangunan	84.714	12,0 %
Pedagang	86.971	12,3 %
Angkutan	27.190	3,85 %
PNS dan Polri	96.979	13,8 %
Pensiunan	40.658	5,77 %
Lainnya	83.623	11,8 %
Jumlah	704.460	100 %

(Sumber : BPS Kota Semarang)

Dari data statistik menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk kota yang menduduki peringkat tertinggi adalah buruh industri dengan 25,6%. Kemudian di ikuti oleh PNS/TNI Polri dengan 13,8%, kemudian di ikuti oleh pedagang dan buruh bangunan. Pekerjaan yang paling sedikit adalah profesi nelayan yaitu hanya 0.39 persen.

Kota Semarang memiliki penduduk yang heterogen terdiri dari beberapa campuran etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Mayoritas penduduk Kota Semarang adalah Suku Jawa, sedangkan untuk bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa. Selain itu, Kota Semarang juga banyak dihuni oleh komunitas etnis Tionghoa. Kota Semarang mempunyai beragam agama yang dianut seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Semarang adalah agama Islam sebesar 1.459.150 jiwa atau 84% dari penduduk Kota Semarang, diikuti Katolik dengan 121.974 jiwa dan diikuti Protestan dengan jumlah 117.257 jiwa. Sedangkan agama Budha dengan jumlah 17.966 jiwa, agama Hindu 10.652 jiwa dan lainnya 2.427 jiwa.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut Kota Semarang Tahun 2017**

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	1.459.150	84 %
Protestan	117.257	6,9 %
Katolik	121.974	7,0 %
Hindu	10.652	0,6 %
Budha	17.966	1,0 %
Lainnya	2.427	0,1 %

(Sumber: BPS Kota Semarang )

Kota Semarang dibanding dengan Kabupaten atau Kota lain di Jawa Tengah memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil laporan BPS Kota Semarang pada tahun 2018, berikut Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Kota Semarang pada tahun 2017.

**Tabel. 6 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Kota Semarang pada tahun 2017**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	82,28	84,10
SMP/MTS	89,60	108,39
SMA/SMK/MA	72,95	102,36

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang

pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen.

## **B. Profil Partai Solidaritas Indonesia**

### **1. Sejarah Berdirinya Partai Solidaritas Indonesia**

Partai politik bukanlah seperti kebutuhan pokok, partai politik baru menjadi kebutuhan jika partai politik itu berhasil menawarkan perubahan, kebahagiaan atau gagasan tentang masa depan yang lebih baik. Tanpa itu, partai politik hanya akan menjadi sekumpulan elit yang tidak terhubung sama sekali dengan rakyat banyak. Untuk itulah Partai Solidaritas Indonesia hadir, menyemai kembali hubungan tak terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun sebuah partai politik moderen yang sejalan dengan kebutuhan jaman, serta tentu saja bukan hanya hadir sebagai partai politik baru, tapi juga menghadirkan karakter dan cara berpolitik yang baru. Karena Partai Solidaritas Indonesia berkeyakinan, tidak mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan jika dijalankan dengan cara yang sama di masa lalu. Dibutuhkan sebuah partai politik baru yang dijalankan oleh orang-orang baru, yang tidak punya keterikatan

dengan kekuatan politik lama. Sebuah kutipan dari Grace Natalie selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Tim PSI, 2015: 1 ).

Era reformasi tidak lagi muda. Tahun ini 'rejim reformasi' telah berusia separuh baya dari lamanya rejim orde baru berkuasa. Tidak dapat dipungkiri banyak kemajuan yang telah dicapai. Kini rakyat merayakan mewahnya kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan pers yang pada masa lalu mahal harganya. Terpilihnya pemimpin dari kalangan rakyat biasa adalah indikasi bahwa demokrasi telah berbuah di Indonesia. Seorang pemimpin yang lahir dari rahim reformasi. Pemimpin baru yang tak terkait dengan rejim masa lalu. Sejarah akan mencatat, inilah kali pertama Indonesia dipimpin oleh seseorang dari kalangan rakyat biasa, bukan berdarah biru ataupun tentara. Namun dinamika politik nasional terlihat sangat dinamis (Tim PSI, 2015 : 3).

Masih banyak amanah reformasi yang belum terwujud. Janji kesejahteraan masih jauh panggang dari api. Angka kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian menganga. Korupsi masih menjadi musuh utama pembangunan (bahkan seorang tersangka korupsi

dinyatakan 't' dan 'proper' menduduki kursi kapolri oleh DPR RI). Perilaku intoleransi di berbagai daerah masih menghantui beberapa kelompok minoritas di tanah air. Salah satu akar dari deretan masalah di atas adalah partai politik. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah yang menyalurkan dan mengagregasi aspirasi, tuntutan dan harapan rakyat. Melalui para kadernya di legislatif dan eksekutif, kebijakan menyangkut hidup orang banyak diputuskan. Politik yang mengatur kebijakan untuk bersama, sejatinya adalah tugas moral-suci partai politik. Namun kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan publik, diputar-arah menjadi membela kepentingan segelintir elit (Tim PSI, 2015 : 4).

PSI berkeyakinan, partai baru adalah sebuah kebutuhan, karena PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru. Lebih jauh, PSI didirikan, untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. Karena PSI meyakini, sebagaimana Gusdur meyakini, bahwa yang lebih penting dari politik adalah

kemanusiaan. Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas pendirian politik seperti itu, PSI mulai membangun dan mempersiapkan diri sebagai partai masa depan (Tim PSI, 2015 : 5).

Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Tim PSI, 2015:3). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) adalah Grace Natalie Lousia. Grace Natalie Lousia terakhir menjadi CEO Saiful Mujani Research and Counsalting (SMRC) salah satu lembaga konsultan politik yang paling memiliki kredibilitas terbaik di Indonesia, sebelumnya Grace Natlie Lousia menjadi presenter di SCTV dan TV One (Tim PSI, 2015 : 3). Pembentukan



DPD Kota Semarang dilakukan pada awal tahun 2017. Sedangkan pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang periode 2015- 2020 disahkan oleh Ketua Umum PSI pada tanggal 30 Agustus 2018 di Jakarta.

## **2. Lambang Partai Solidaritas Indonesia**

Lambang partai digunakan pada atribut-atribut partai yang ketentuan penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Adapun arti dan lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:



(Sumber : Tim PSI, 2015: 10)

Lambang Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari beberapa elemen, yakni sebuah segi empat berwarna merah dengan gambar kepalan tangan yang memegang bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI dengan huruf P yang terbuka (Tim PSI, 2015:10).

- a. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas, dan kekuatan.
- b. Tulisan PSI merupakan singkatan dari Partai Solidaritas Indonesia. Dengan huruf ‘P’ terbuka, ini menunjukkan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua golongan dan kalangan.
- c. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokratis substantif yang juga termasuk dalam UUD 1945. Ide bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno pada tanggal 29 Juli 195 di Semarang. Dengan kutipannya sebagai berikut “Bunga Mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan

sendirinya harus semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya”.

- d. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila, dan tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti.
- e. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimisme, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
- f. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang mencoba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia (Tim PSI, 2015:10).

### **3. Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia**

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Misi PSI adalah sebagai berikut (Tim PSI, 2015:7):

- a. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

- b. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
- c. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali bentengbenteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
- d. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang (Tim PSI, 2015:7).

#### **4. Syarat Menjadi Kader dan Pengurus PSI**

Kebaruan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat diindikasikan dari karakter dan nilai dasar yang dianut PSI yang sekaligus menjadi syarat dapat bergabung dengan PSI (Tim PSI, 2015:3).

- a. Partai Baru dengan Aktis Politik Baru PSI adalah partai baru yang dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus harian partai apa pun. Ini adalah cara sadar

PSI sebagai Partai baru untuk memutus mata-rantai dari perilaku, spirit, dan tradisi buruk partai-partai politik lama.

- b. Partai Baru dengan Aktis Politik Muda PSI adalah partai baru yang dikelola aktis muda berusia di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahunan, Ini adalah cara PSI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda bangsa untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Ini juga cara PSI menolak politik gerontokrasi: politik yang didominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara-cara 'tua dan usang'.
- c. Partai Baru yang Inklusif dan Pluralis PSI adalah partai baru yang terbuka (inklusif dan pluralis) bagi seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras mereka. Spirit inklusivitas dan pluralitas PSI juga tergambar dari pola rekrutmen kader PSI -yang akan mengabdikan diri di lembaga Legislatif dan Eksekutif- dengan mengedepankan kriteria objektifrasional ketimbang

kriteria primordial berbasis kesukuan atau kagamaan.

- d. Partai Baru yang Ramah Anak dan Perempuan PSI adalah partai baru yang keputusan-keputusan politiknya diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. PSI secara konsisten membangun struktur organisasinya dengan memberikan porsi yang besar bagi perempuan untuk menjadi pengurus PSI. Ini dibuktikan dengan aturan yang ketat mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan PSI. Bahkan PSI berupaya untuk mencapai angka minimal 40% pengurus perempuan di setiap tingkatan. Dibuktikan dengan angka 60% kepengurusan perempuan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
  - e. Partai Baru yang Ramah Lingkungan PSI adalah partai baru yang berorientasi 'hijau', dimana kebijakan pembangunan selalu dilandaskan kepada keberpihakan kepada konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.
- 3.6. Partai Baru yang Modern PSI adalah partai baru yang modern, karena (1) menganut 'nilai-nilai

kemanusiaan modern' seperti penegakan demokrasi dan pembelaan terhadap hak asasi manusia; (2) mempercayai ilmu pengetahuan dan oleh karena itu seluruh kebijakan diambil berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. PSI juga mempercayai survey yang mempergunakan metodologi yang sah sebagai cara menampung aspirasi masyarakat; (3) mempergunakan teknologi informasi dalam manajemen internal partai dan kampanye publiknya (Tim PSI, 2015:3).

## **5. Struktur Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia**

Struktur kepemimpinan PSI dibangun seramping mungkin untuk efektivitas dan efisiensi kerja-kerja politik menyiapkan verifikasi Kumhan dan KPU. Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Indonesia (DPP PSI) terdiri dari 9 (Sembilan) orang. Ketua Umum DPP PSI adalah Grace Natalie Louisa. Sekretaris Jenderal DPP PSI adalah Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni menyelesaikan studi S2 di Inggris dan S3 di Australia. Sebelum bergabung di PSI Toni menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah pada tahun 2000-

2002 dan direktur eksekutif MAARIF Institute for Culture and Humanity pada tahun 2005-2009 (Tim PSI, 2015: 9). Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Indonesia (DPW PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level propinsi yang terdiri dari 7 orang yaitu Ketua, 2 orang Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara. Dewan Pimpinan Daerah Solidaritas Indonesia (DPD PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level kota/kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara. Dewan Pimpinan Cabang Solidaritas Indonesia (DPC PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (Tim PSI, 2015:10).

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1216/SK/DPP/2018 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2018, maka ditetapkan bahwa sebagai berikut.

Ketua : Ferdian Fajar



Wakil Ketua : Grace Giovani  
Sekretaris : Chairul Basar  
Wakil sekretaris : Vita Wahyu Utami  
Bendahara : Ardi Wahyu Nugraha

## **6. Perbedaan PSI dengan Partai lain**

PSI sebagai partai baru yang konsisten merekrut pengurusnya yang bukan bagian dari partai politik lama tidak punya ketersambungan dengan kekuatan politik lama. Dengan demikian PSI bisa secara konsisten melakukan gerakan politik yang sama sekali baru tanpa harus tersandera dengan kepentingan politik lama, klientalisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya. PSI jelas memberikan porsi yang besar pada perempuan, sehingga gerakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% persen perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui keterlibatan aktif perempuan di dalamnya. PSI secara konsisten memisahkan antara dua hal yang selama ini kadang menjadi kabur, antara mengurus partai dan mengurus politik. Sejak awal PSI telah memisahkan

struktur politik dengan struktur administratifnya. Tidak akan terjadi politisi mengurus administrasi partai lalu menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan, karena partai akan diurus oleh orang-orang muda profesional yang paham betul bagaimana mengurus organisasi yang moderen, professional, bersih dan transparan (Tim PSI, 2015:24).

### **C. Potret Kandidat PSI**

Pada Pemilu 2019 menggunakan sistem proposional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk memilih individu dari pada partai. Lewat sistem ini caleg akan langsung bersentuhan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengenal para caleg lebih dekat dibandingkan sistem proposional tertutup. Dalam keikutsertaan PSI pada pemilihan legislatif, telah menempatkan caleg-calegnya pada setiap Dapil di kota Semarang yang berjumlah 44 Caleg. Pada Dapil satu berjumlah 8 caleg, Dapil dua berjumlah 11 caleg, Dapil tiga berjumlah 8 caleg, Dapil empat 3 caleg, Dapil lima 7 Caleg dan terakhir Dapil enam berjumlah 7 Caleg. Adapun untuk jumlah Caleg Laki-laki 26 orang dan Caleg perempuan 18 orang. Partai Solidaritas Indonesia

menjadi satu-satunya partai baru yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Semarang. Berikut hasil perolehan suara Caleg PSI yang berhasil lolos ke DPRD Kota Semarang.

**Tabel. 7 Perolehan Jumlah Suara Calon Legislatif PSI Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2019**

Nama	Melly Pangestu			Benediktus Narendra K		
Dapil	Dapil 1			Dapil 2		
No. Urut	3			2		
Perolehan Per-Kecamatan	Semarang Tengah	Semarang Utara	Semarang Timur	Gayamsari	Genuk	Pedurungan
	900	666	780	225	200	1.147
Jumlah	2346			1602		

(Sumber: KPU Semarang, dikelola penulis)

Di daerah pemilihan satu Kota Semarang meliputi Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Utara caleg Nomor urut tiga Melly Pangestu berhasil mengantongi 2.346 suara. Melly Pangestu menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak diantara caleg- caleg PSI lainnya. Melly adalah seorang pengusaha dibidang event organizer yang merupakan keturunan etnis Tionghoa. Dalam struktur kepengurusan PSI di Kota Semarang, dia menjabat sebagai kader biasa. Alasan dia bergabung dengan PSI karena menurutnya partai Solidaritas

Indonesia hadir membawa pembaruan sebagai partai yang bersih dan tanpa mahar politik sebagai kaum minoritas dia bisa masuk. Sementara, di daerah pemilihan dua yang meliputi Gayamsari, Genuk dan Pedurungan, caleg nomor urut dua Benediktus Narendra Keswara berhasil menduduki kursi DPRD Kota Semarang dengan memperoleh 1.602 suara. Narendra Keswara merupakan seorang pengusaha kuliner yang menjabat sebagai kader biasa dan tidak masuk dalam struktur kepengurusan PSI di Kota Semarang.

#### **D. Dinamika Pemilihan Legislatif Kota Semarang**

Dinamika pemilihan legislatif Kota Semarang pada tahun 2019 dapat dilihat dari jalannya pemilihan legislatif itu sendiri, jumlah daftar pemilih tetap, sistem pemilihan legislatif yang digunakan, hasil dari pemilihan legislatif dan yang terakhir Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih di Kota Semarang.

##### **1. Pemilihan Legislatif Kota Semarang 2019**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2019, dilaksanakan serentak bersamaan dengan pemilihan presiden yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun ini diikuti oleh 14

partai peserta Pemilu dan 669 calon anggota DPRD Kota Semarang. Pemilu Tahun 2019 memperebutkan 50 kursi anggota DPRD Kota Semarang. Kota Semarang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan (Dapil). Dapil 1 terdiri dari kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Utara. Dapil 2 terdiri dari kecamatan Gayamsari, Genuk dan Pedurungan. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Candisari dan Tembalang. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Banyumanik, Gajah Mungkur dan Gunung Pati. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Mijen, Ngaliyan dan Tugu. Adapun dapil 6 terdiri dari Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.134.279. Adapun rincian untuk pemilih laki-laki berjumlah 550.630 dan pemilih perempuan berjumlah 583.649. Jumlah antara pemilih laki-laki dan perempuan hanya terpaut angka yang tidak cukup jauh. Terdapat 3 kecamatan yang memiliki daftar pemilih tetap terbanyak yaitu, Kecamatan Pedurungan dengan jumlah pemilih tetap 130.483 orang, Kecamatan Tembalang dengan jumlah pemilih tetap 117.046 orang dan Kecamatan

Semarang Barat dengan jumlah pemilih 109.013 orang. Sedangkan untuk Kecamatan dengan jumlah pemilih terkecil adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah pemilih tetap 23.087 orang. Untuk mengetahui jumlah pemilih yang tercantum pada DPT dalam setiap Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8. Jumlah Pemilih dalam DPT Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2019**

No	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Pemilih Dlm DPT	Jumlah DPT Dlm Setiap Dapil
1	Kota Semarang 1	Semarang Tengah	44.696	
		Semarang Timur	52.918	
		Semarang Utara	85.230	
		Jumlah		<b>182.844</b>
2	Kota Semarang 2	Gayamsari	50.329	
		Genuk	75.088	
		Pedurungan	130.483	
		Jumlah		<b>255.900</b>
3	Kota Semarang 3	Candisari	55.726	
		Tembalang	117.046	

		Jumlah		<b>172.772</b>
4	Kota Semarang 4	Banyumanik	95.385	
		Gajahmungkur	41.219	
		Gunungpati	63.222	
		Jumlah		<b>199.826</b>
5	Kota Semarang 5	Mijen	48.202	
		Ngaliyan	93.756	
		Tugu	23.087	
		Jumlah		<b>165.045</b>
6	Kota Semarang 6	Semarang barat	109.013	
		Semarang Selatan	48.879	
		Jumlah		<b>157.892</b>
Jumlah DPT Se- Kota Semarang				<b>1.134.279</b>

(Sumber: KPU Kota Semarang, dikelola penulis)

Dapil 2 Kota Semarang merupakan dapil dengan jumlah pemilih tetap terbanyak yaitu 255.900 orang, sedangkan alokasi jumlah kursi anggota DPRD pada Dapil ini adalah 11 kursi. Untuk Dapil 4 jumlah pemilih tetap adalah 199.826 orang, alokasi jumlah kursi pada Dapil 4 yakni 9 kursi. Pada Dapil 1 dan Dapil 3 jumlah alokasi kursi sebanyak 8 kursi. Adapun untuk jumlah pemilih tetap pada Dapil 1 dan Dapil 3 masing- masing berjumlah 182.844 orang dan 172.772 orang. Sedangkan untuk Dapil 5 dan

Dapil 6 jumlah alokasi kursi masing-masing 7 kursi. Jumlah pemilih tetap pada Dapil 5 dan Dapil 6 masing-masing berjumlah 165.045 orang dan 157.892 orang.

## **2. Sistem Pemilihan Legislatif 2019**

Pada demokrasi perwakilan, sistem pemilu menjadi bagian penting dari kerja sistem politik. Sistem pemilu yang digunakan pada pemilihan legislatif tahun 2019 masih sama dengan sistem pemilihan legislatif pada tahun sebelumnya, yaitu sistem perwakilan proporsional terbuka (*proportional representation system open list*). Sistem proporsional terbuka adalah sistem memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) berdasarkan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut. Sistem ini memungkinkan bagi rakyat untuk lebih mengenal dan memilih wakil-wakilnya secara terbuka, jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup yang ditentukan oleh partai politik.

Pada pemilu tahun 2019, setiap partai peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya yaitu 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



pengajuan kuota daftar calon legislatif maksimal 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Berbeda dari pemilihan legislatif tahun sebelumnya, dimana penerapan kuota daftar calon legislatif maksimal sebesar 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Format kertas suara pada pemilihan legislatif 2019 mencantumkan nama dan tanda gambar partai juga disertakan daftar calon anggota DPRD dari setiap partai berdasarkan nomor urut. Adapun cara penyuaaraan (*balloting*) yang digunakan adalah dengan mencoblos tanda gambar partai saja, dan atau tanda gambar partai sekaligus nama calon legislatif yang terdapat dalam daftar. Dalam penyuaaraan kertas suara tersebut, suarah dinyatakan sah apabila pemilih, memilih tanda gambar partai saja, memilih calon legislatif yang terdapat dalam daftar saja, atau memilih tanda gambar partai dan memilih calon legislatif yang terdapat dalam daftar secara bersamaan. Suara dianggap tidak sah apabila memilih tanda gambar dari sebuah partai, tetapi memilih nama calon legislatif dari partai lain secara bersamaan.

Pada sistem proporsional terdapat sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi pada partai politik. Lijpart, secara gaeris besar

memilah perhitungan suara menjadi dua yaitu, teknik Kuota dan Divisior (Pamungkas, 2009: 31). Teknik Kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (*the largest remainder*) mengenal beberapa varian dan yang paling terkenal adalah varian Hare dan Droop. Pada varian Hare, perolehan kursi masing- masing partai ditentukan oleh hasil pembagian antara perolehan suara partai dengan bilangan pembagi pemilih tersebut. Sementara pada varian Droop, bilangan pembagi pemilih diperoleh dengan cara membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan (Pamungkas, 2009: 32). Metode Kuota varian Hare paling dikenal di Indonesia, sebab paling sering digunakan dari Pemilu ke Pemilu. Pada Pemilu tahun 2014 juga menggunakan teknik Kuota varian Hare.

Pada teknik Divisior atau dikenal juga dengan perhitungan rata- rata angka tertinggi (*the highest average*) memiliki beberapa varian, yang membedakan dari tiap varian adalah bilangan pembaginya. Varian pertama adalah D'Hondt yang menggunakan bilangan pembagi berangka utuh (1,2,3,4,5,6,7, dan seterusnya) kemudian diseleksi angka tertinggi. Sedangkan varian kedua adalah Sainte

Lague menggunakan bilangan pembagi berangka ganjil (1,3,5,7,9, dan seterusnya) kemudian dipilih angka tertinggi. Jika dibandingkan antara varian D'Hoodt dan Sainte Lague, terlihat bahwa varian Sainte Lague lebih sensitif terhadap partai dengan perolehan suara kecil. Sementara itu dilihat dari disproporsionalitas suara, varian D'Hondt disproporsionalitasnya lebih tinggi (Pamungkas, 2009: 34) disproporsionalitas adalah tingkat penyimpangan antara pembagian kursi partai dan perolehan suara.

Metode yang digunakan untuk mengkonversi perolehan suara partai ke kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada pemilihan legislatif 2019 menggunakan teknik Divisor varian Sainte Lague. Aturan tersebut sesuai dengan Pasal 420 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah memenuhi ambang batas atau *parliamentary threshold* sebesar 4%, perolehan suara partai tersebut akan dikonversi menjadi kursi pada setiap daerah pemilihan. Dalam Pasal 420 berbunyi, Suara Sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada

suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi, maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut.

Penentuan calon legislatif jadi di sebuah partai politik yang memperoleh kursi parlemen adalah didasarkan pada sistem suara terbanyak. Kandidat yang mendapatkan suara paling banyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan ditetapkan menjadi calon jadi. Penggunaan sistem suara terbanyak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pasal 420. Secara lebih detail, berikut adalah mekanisme penetapan calon jadi anggota DPRD, yaitu:

- a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.
- c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pada mekanisme penentuan calon jadi tersebut, terlihat bahwa nomor urut tidak menjadi faktor utama dalam penentuan calon jadi. Setiap calon legislatif mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menjadi pemenang.

### **3. Hasil Pemilihan Legislatif Kota Semarang 2019**

Pada hasil pemilihan umum 2019 secara nasional, 9 partai politik dinyatakan lolos syarat ambang batas sebesar 4 persen. Sisanya, sebanyak 7 Parpol gagal mengirimkan perwakilannya ke Senayan. Adapun partai yang lolos ke Senayan adalah PDIP, Partai Gerinda, Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP dan Partai Nasdem. Partai baru seperti Perindo, Berkarya, PSI dan Garuda tidak beruntung pada Pemilu 2019. Tidak satupun partai baru yang berlaga, berhasil lolos syarat ambang batas nasional. Jika dibandingkan pada Pileg 2014, ada 12 partai politik nasional yang ikut dalam kontestasi. Partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen pada saat itu ada 10

partai. Pada pemilu 2014, partai NasDem menjadi satu-satunya partai baru yang lolos melewati *parliamentary threshold* di level nasional. Tidak lolosnya semua partai baru ke senayan pada pemilu 2019, menjadi sejarah baru sejak pemilu 2004.

Meskipun kandas di tingkat nasional, partai-partai baru masih mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kota. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 414 Ayat (1) dan (2) UU No.7/2017 ambang batas empat persen, hanya diperuntukan untuk penentuan perolehan kursi di DPR RI. Sehingga jika partai tidak lolos ambang batas parlemen di DPR RI, masih bisa memperoleh kursi ditingkat Daerah. Dari hasil Pileg 2019 di Kota Semarang PDIP berhasil mempertahankan gelarnya sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak. Berikut ini adalah perolehan jumlah kursi Partai Politik dari hasil Pileg 2019 dan Pileg 2014 diurutkan berdasarkan jumlah kursi tertinggi ke terendah.

**Tabel 9. Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik  
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2014**

No	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	PDIP	2	3	3	2	3	2	15
2	Partai Gerinda	1	1	2	1	1	1	7
3	Demokrat	1	1	1	1	1	1	6
4	PKS	1	1	1	1	1	1	6
5	Partai Golkar	1	1	1	1	1	0	5
6	PKB	0	1	1	1	1	0	4
7	PAN	1	0	1	0	1	1	4
8	PPP	0	0	1	0	0	1	2
9	Partai Nasdem	0	1	0	0	0	0	1
Jumlah Alokasi Kursi		7	9	11	7	9	7	50

(Sumber: KPU Semarang )

**Tabel 10. Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik  
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang 2019**

No	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	PDIP	3	5	3	3	3	3	19
2	Partai Gerinda	1	1	1	1	1	1	6
3	Demokrat	1	1	1	1	1	1	6
4	PKS	1	1	1	1	1	1	6
5	PKB	0	1	1	1	1	0	4
6	Partai Golkar	0	1	0	1	0	1	3
7	PAN	0	0	0	1	1	0	2
8	PSI	1	1	0	0	0	0	2
9	Partai Nasdem	1	0	1	0	0	0	2
Jumlah Alokasi Kursi		8	11	8	9	7	7	50

(Sumber: KPU Semarang)

PDIP memperoleh 19 kursi, menigkat signifikan dari perolehan Pileg 2014 yang mendapatkan 15 kursi. Terdapat tiga partai yakni, Partai Gerinda, PAN dan Golkar yang mengalami penurunan perolehan kursi. Partai Gerinda turun satu kursi dari hasil Pileg 2014 yang berhasil mendapatkan 7 kursi. Partai Amanat Nasional turun dari 4 kursi menjadi 2 kursi. Partai Golkar turun dari 5 kursi menjadi 3 kursi. Sedangkan, tiga partai yang perolehan jumlah kursinya sama dengan perolehan hasil Pileg 2014, yaitu PKB, PKS dan Partai Demokrat. PKS dan Partai



Demokrat masing masing memperoleh 6 kursi. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 4 Kursi. Partai Nasdem meningkat dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Sementara itu PPP dari hasil Pileg 2014 mendapatkan 2 kursi, pada tahun ini tidak mendapatkan kursi. Kehadiran PSI berhasil mengeluarkan PPP dari daftar partai terpilih pada pemilihan anggota DPRD Kota Semarang.

#### **4. Partisipasi Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilih Kota Semarang**

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan ikut serta dalam kegiatan pemilu tersebut. Namun sebaliknya, rendahnya atau menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menunjukkan tanda yang kurang baik, yang dapat mencerminkan masyarakat apatis terhadap pemilu (Solihah, 2018 :23). Pasca reformasi, pemilihan umum telah diselenggarakan sebanyak 5 kali yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan terakhir Pemilu serentak pada tahun 2019. Adapun Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebanyak empat kali yaitu mulai pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Partisipasi pemilih yang dilaporkan oleh KPU Kota Semarang adalah pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang, mulai dari pemilu tahun 2009 sebagai berikut.

**Tabel 11. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota Semarang Tahun 2009 – 2019**

No	Pemilihan Umum	Tahun	Jumlah Pemilih	Partisipasi Pemilih
1	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	2009	1.087.463	71,41%
2	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2009	1.094.832	78,79%
3	Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2010	1.100.337	60,06%
4	Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	2013	1.125.696	61,44%
5	Pemilu Anggota DPR, DPD	2014	1.101.290	75,15%

	dan DPRD			
6	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2014	1.121.824	79,88%
7	Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2015	1.117.884	65,43%
8	Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	2018	1.114.643	72,80%
9	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	2019	1.134.279	82,20%
10	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2019	1.134.279	83,20%

(Sumber: KPU Kota Semarang, dikelola oleh penulis)

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilih sebesar 71,41% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.087.463 jiwa. Kemudian pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam

menggunakan hak pilih sebesar 78,79% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.094.832 jiwa. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih menurun 60,06% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.100.337 jiwa. Adapun Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebesar 61,44% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.125.696 jiwa.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat pemilih meningkat menjadi 75,15% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 1.101.290 jiwa. Kemudian pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih di Kota Semarang meningkat mencapai 79,88% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.121.824 jiwa. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebesar 65,43% dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebesar 1.117.884 jiwa. Sedangkan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 angka partisipasi masyarakat pemilih

dalam menggunakan hak pilih sebesar 72,80% dari total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 1.114.643 jiwa.

Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilih sebesar 82,20% dari jumlah pemilih total sebesar 1.134.279 jiwa. Kemudian pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilih sebesar 83,20% dari jumlah pemilih total sebesar 1.134.279 jiwa. Pada pemilihan serentak tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang termasuk paling tinggi, dibandingkan pemilu- pemilu pada tahun sebelumnya. Tak tanggung- tanggung kenaikan angka partisipasi masyarakat bahkan mencapai 6% lebih.

## **BAB IV**

### **STRATEGI KAMPANYE POLITIK CALEG PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

#### **A. Strategi Kampanye Politik Caleg PSI**

Kampanye politik atau *political campaign* mempunyai tujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan- jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilu (Venus, 2018: 17). Agar kampanye dapat berhasil dengan maksimal, semua strategi kampanye harus diupayakan untuk mencapai sasaran. Penetapan strategi kampanye yang akan digunakan merupakan langkah krusial yang harus mempertimbangkan banyak hal. Jika penetapan strategi yang digunakan salah atau keliru maka berakibat fatal. Dalam hal ini, kemampuan kandidat memenangkan sebuah pertarungan sangat ditentukan oleh strategi apa saja yang digunakan. Caleg Partai Solidaritas Indonesia dalam menghadapi pemilu

legislatif 2019 di Kota Semarang menggunakan beberapa strategi, yaitu kepemilikan isu dan komunikasi politik.

### **1. Strategi Kepemilikan Isu**

Strategi yang pertama yaitu kepemilikan isu, mengutip teori kepemilikan isu dari Petrocik, bahwa kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan juga menjadi salah satu akses pemenangan bagi para calon dari suatu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut. Isu yang diangkat, ditawarkan dan diperjuangkan partai politik menjadi penting dan menentukan keberhasilan pola marketing partai politik terhadap konstituennya. Isu- isu yang dimiliki partai PSI di tingkat nasional yakni perempuan, anti korupsi, toleransi dan anak muda. Adapun dalam pelaksanaannya, caleg PSI membawa isu- isu tersebut ke dalam bentuk pesan kampanye yang sangat beragam. Ferdian Fajar selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang, mengatakan:

“Semua punya strategi masing-masing di dapil masing-masing, karena apa peta politik di setiap dapil itu beda- beda. Seperti di dapil 5 (Ngaliyan, Tugu dan Mijen) tidak bisa disamakan dengan dapil 2. Dari segi etnis beda, dari segi keyakinan beda itu berpengaruh. Ada basis hijau, ada basis merah,

tantangannya masing-masing. Makanya pinter-pinter bagaimana mengangkat isu”(Ferdian, Semarang 30 Juli 2019). Melly Pangestu caleg terpilih dari dapil satu Kota Semarang mengatakan :

“Isu yang disampaikan sama, jika pusat berbicara tentang anti korupsi. Kita juga berbicara tentang anti korupsi. Jika pusat berbicara tentang penolakan Perda berdasarkan agama, ya kita sampaikan hal yang sama. Apa yang disampaikan di pusat itulah yang kita sampaikan di bawah” (Melly Pangestu, Semarang 1 September 2019).

Hasil penelitian menunjukkan, isu- isu yang dimainkan oleh caleg PSI di Kota Semarang, tergantung dari situasi dapil yang dihadapi serta kebutuhan riil konstituennya. Isu-isu yang dimaksud bukan berarti memilih salah satu isu yang dimiliki PSI, namun lebih kepada isu mana yang lebih ditonjolkan caleg saat melakukan kampanye politik. Dalam hal ini, Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara lebih menggunakan isu anti korupsi dan anti intoleransi sebagai isu yang tepat untuk menarik dukungan masyarakat Kota Semarang.

## **2. Strategi Komunikasi Politik PSI**

Mengutip Arifin (2011), kampanye politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi dalam waktu tertentu (Mawardin, 2018: 108).



Menurut Cangara, komunikasi politik lebih menitik beratkan sebagai proses pengoperan lambang- lambang atau simbol- simbol komunikasi yang berisi pesan- pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009 : 35). Adapun strategi komunikasi politik yang digunakan oleh caleg PSI yakni melalui pesan politik yang digunakan dan strategi kampanye dengan komunikasi secara langsung atau *door to door*.

**a. Pesan Politik**

Dalam komunikasi politik, strategi mengemas pesan politik merupakan hal yang sangat penting. Pesan yang akan diangkat harus sesuai dengan isu- isu politik yang sedang berkembang dalam masyarakat (Firmanzah, 2018: 261). Tujuan utama dari pesan politik adalah menggerakkan masyarakat. Hal itu tidak dapat tercapai tanpa adanya isu politik yang benar- benar mencerminkan kondisi masyarakat (Firmanzah, 2018: 262). Idealnya, untuk mendapatkan isu-isu yang betul- betul strategis harus dilakukan identifikasi isu-

isu (*issue identification*) yang berkembang di tengah publik (tabroni, 2016: 39). Dari hasil penelitian, pesan politik yang digunakan oleh Melly Pangestu dan Benektidus Narendra Keswara melalui slogan kampanye yakni “anti korupsi dan anti intoleransi”. Keunggulan dalam menggunakan slogan kampanye yakni, masyarakat dapat dengan mudah mengingat pesan kampanye yang disampaikan. Berikut adalah cara caleg PSI menyampaikan isu kampanyenya.

#### 1) Anti Korupsi

Anti korupsi bukanlah jargon baru yang disampaikan partai politik untuk menarik simpati masyarakat. Antikorupsi selalu menjadi isu terdepan menjelang pemilihan umum. Akan tetapi, kenyataan tidak seindah dengan jargon-jargon yang disampaikan partai. Masih banyak kader partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mulai dari anggota DPR dan DPRD hingga kepala daerah banyak yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Caleg PSI Kota Semarang menjadikan antikorupsi sebagai image atau slogan kampanye. Ferdian Fajar menganggap

cara caleg PSI mengkampanyekan isu anti korupsi yaitu dengan cara tindakan langsung ke konstituen.

“Melalui tulisan di atribut seperti kaos itu ada tulisan anti korupsi dan anti intoleransi. Tapi yang paling penting cara menyampaikan isu- isu yang kita kampanyekan ya kita buktikan secara langsung. Bahwa kita anti korupsi dan tidak menggunakan *money politic*. Karena korupsi ya di mulai dari situ, pengeluaran besar saat kampanye setelah jadi ya cari balik modal” (Ferdian, Semarang 30 Juli 2019).

Sebagai partai yang memposisikan diri menjadi partai yang anti korupsi, partai solidaritas indonesia dalam setiap gerak politiknya konsisten dengan nilai- nilai yang diperjuangkan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dan tindakan politik yang dilakukan adapun konsistensi caleg PSI Kota Semarang sebagai partai antikorupsi yakni. (a) Tidak merekrut mantan napi korupsi untuk menjadi kader partai. Pada pemilihan umum 2019 masih saja ada partai politik yang mendaftarkan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif. Hal ini tentu membuktikan

buruknya rekrutmen dan kaderisasi sebuah partai yang belum bisa menyodorkan nama caleg yang bersih. Salah satu syarat dalam proses rekrutmen PSI yaitu orang- partai baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus harian partai apa pun. Ini adalah cara sadar PSI sebagai Partai baru untuk memutus mata-rantai dari perilaku, spirit, dan tradisi buruk partai-partai politik lama. (b) Tidak berkampanye dengan dana yang berlebihan. (c) Tidak menggunakan politik uang sebagai alat kampanye. Jadi dapat disimpulkan bahwa caleg PSI Kota Semarang dalam menyampaikan isu anti korupsi yaitu dengan cara tindakan nyata ke masyarakat secara langsung.

b) Anti Intoleransi

Isu- isu berbasis toleransi sangat penting disuarakan untuk masyarakat Kota Semarang yang majemuk. Intoleransi sendiri, adalah sikap ketidak-bersediaan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menerima perbedaan yang ada dalam diri orang lain atau kelompok lain. Intoleransi yang

menonjol ditengah masyarakat yaitu tentang keagamaan. Caleg PSI sangat menentang pemilihan umum yang menggunakan isu agama sebagai komoditas politik. Menurut Muhammad Ja'far, Peneliti Pustaka LP3ES, satu diantara sekian materi kampanye yang pasti akan dinilai memiliki nilai strategis oleh beberapa partai politik adalah isu keagamaan. Terlepas dari perdebatan tentang pentingnya agama terintegrasi dalam sistem negara, secara substansial penggunaan agama sebagai isu kampanye dapat diekspresikan dalam dua bentuk.

Dua bentuk yang dimaksud adalah : Pertama, dengan berbicara tentang agama. Penggunaan isu agama dinilai memiliki efektifitas dalam menjaring simpati politik atau suara dari massa pemilih. Ada dua pilihan yang bisa digunakan, jika sebuah partai politik memilih berbicara soal agama : (1) Dengan menegaskan afiliasi politiknya terhadap sebuah ajaran agama tertentu sebagai basis ideologinya. (2) Sebuah partai politik dapat berbicara soal agama dengan

cara menegaskan prinsip non-afiliasinya terhadap sebuah agama tertentu. Kedua, dengan diam soal agama. Artinya partai politik ‘tutup mulut’ soal agama, isu agama tidak diakomodasi dalam panggung politik (Tabroni, 2014: 37)

Melly Pangestu menganggap isu toleransi saat dijunjung dalam cara dia berkampanye melalui tidak pernah membahas agama sama sekali karena menurutnya agama adalah hal yang sangat sensitif untuk diangkat dalam perpolitikan. Melly dalam wawancara mengatakan :

“Anti korupsi, intoleransi termasuk Perda syariah. Tetapi secara langsung kita tidak pernah berbenturan atau membahas agama rekan- rekan atau konstituen. Karena itu agak riskan, sifatnya pribadi jadi kita menghindari hal- hal yang seperti itu”.(Melly Pangestu, 1 September 2019)

Namun Melly juga menganggap kampanye toleransi perlu diwujudkan dalam bentuk gerakan parlementer yaitu penghapusan Peraturan Daerah berlandaskan agama. Sedangkan Benediktus

Narendra Keswara dalam wawancara juga mengatakan :

“Kita masuk ke dunia politik mengangkat dua garis besar ini (anti korupsi dan toleransi) supaya politik yang ada di Indonesia adalah politik yang bermartabat, menjadi politik yang baik bukan yang buruk. Makanya saat kita kampanye tidak pernah bawa-bawa agama”( Benetikdus, 1 September 2019).

Benediktus menganggap isu toleransi dia gunakan dalam berkampanye adalah cara yang tidak membeda- bedakan konstituen berdasarkan agama dan mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, dapat disimpulkan caleg PSI Kota Semarang dalam melakukan kampanye tetap berbicara soal agama dalam hal ini caleg juga memanfaatkan isu agama sebagai materi kampanye, namun dengan cara menegaskan prinsip non-afiliasinya terhadap sebuah agama tertentu. Sikap caleg PSI yang menegaskan menolak Peraturan Daerah berbasis keagamaan, menunjukkan ketidakberpihakan pada salah satu agama,

melainkan pada semua agama melalui kebijakan-kebijakan politik yang ditawarkan.

**b. Saluran Kampanye *door to door***

Imawan (1997) dalam Amir(2006) merumuskan beberapa teknik kampanye politik, yaitu. (a)Kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*), (b) Diskusi Kelompok (*group discussion*), (c) Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*), (d) Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*). Caleg PSI Kota Semarang lebih fokus untuk melakukan kampanye dengan cara *direct selling* atau biasa disebut kampanye *door to door*. Kampanye teknik *door to door* merupakan strategi yang dianggap cukup sukses untuk meranarik dukungan masyarakat. Tujuan utama dari *door to door* adalah untuk memperkenalkan caleg partai, menjelaskan isu-isu politik, program kerja dan visi misi partai Solidaritas Indonesia.

Memperkenalkan caleg-caleg PSI melalu *door to door* langsung ke masyarakat sangat perlu dilakukan mengingat PSI merupakan pendatang baru di lingkungan politik Kota Semarang. Saluran langsung dengan cara kunjungan ke rumah- rumah masyarakat



memungkinkan munculnya interaksi, hingga penguatan secara langsung dari penyampaian pesan atau penyelenggaraan kampanye kepada publik, baik yang baru menyadari suatu gagasan maupun yang sudah mencoba gagasan tersebut. (Venus, 2018: 144). Selain efektif kampanye dengan cara turun langsung ke masyarakat juga murah biaya, hal ini sekaligus menjawab persoalan partai Solidaritas Indonesia yang minim dengan dana kampanye. Misalnya, Melly Pangestu fokus untuk melakukan kampanye *door to door* secara rutin, hal itu dilakukan untuk menghemat biaya. Menurutnya kerja keras adalah konsekuensi yang harus dilakukan untuk caleg bermodal kecil. Dia memulai berkampanye dari pagi sampai malam untuk membuktikan bahwa kampanye bersih itu masih ada.

Strategi yang berbeda di gunakan oleh Benediktus Narendra Keswara, selain menggunakan cara 'door to door', Benediktus juga menggunakan strategi MLM untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat. MLM (Multi Level Marketing) sendiri merupakan strategi pemasaran berjenjang dimana intinya adalah membentuk jaringan bisnis atau

pemasaran dan membagi- bagi keuntungan bersama.

Dikutip dari wawancara dengan Benediktus :

“ Kita mempunyai strategi jaringan *Multi Level Marketing*, saya punya produk saya kenalkan dengan anda, anda akan mengenalkan ke yang lain dan yang lain akan mengenalkan ke yang lainnya. Misalnya pak tolong dong pilih saya, tolong sampaikan ke lima temen bapak yang lain. Multi Level jadi itu strateginya” (Benediktus, Semarang 1 Agustus 2019).

Strategi jaringan laba- laba, atau pola multi-level marketing, yang digunakan Benediktus yaitu dengan menggunakan keluarga, kerabat, sanak saudara dan teman dekat sebagai mesin politik untuk mendulang dukungan suara. Pada dunia politik, strategi pemasaran MLM yang digunakan untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum, bukanlah hal yang baru. Pada panggung Pemilihan Presiden 2019, Timses Prabowo Sandi juga menggunakan strategi sistem MLM untuk menarik dukungan (Aditya, 2018).

## **B. Faktor Kemenangan Caleg PSI Kota Semarang**

Kemenangan caleg PSI sebagai kandidat dari partai pendatang dalam pemilihan legislatif Kota Semarang cukup mengejutkan. Kemenangan ini dianggap mengejutkan karena tantangan di Kota Semarang yang kuat dengan basis merah dan hijau. Tak tanggung-tanggung sebagai partai baru, PSI bisa menyingkirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daftar partai yang lolos pada pemilihan legislatif 2019. Berikut ini akan dibahas beberapa faktor yang menjadi penentu kemenangan caleg PSI di Kota Semarang, berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

### **1. Masyarakat Perkotaan Kota Semarang**

Dan Nimmo menyebutkan tiga hal sangat penting dalam mempersepsi komunikasi tentang isu dan kandidat yang diterima selama kampanye yaitu, atribut, perspektif dan persepsi pemberian suara. Pemberian suara mengalihkan pilihannya dari satu partai kepada partai lain atau dari satu kandidat kepada kandidat lain disebabkan karena adanya atribut sosial dan demografi. Artinya pemberian suara menjatuhkan pilihan kepada partai atau

kandidat tertentu yang memiliki program, yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan demografinya (Mawardi, 2018: 159).

PSI adalah partai yang identik dengan masyarakat kelas menengah dan masyarakat urban. Hal ini dapat dilihat dari isu-isu politik yang dimiliki partai PSI, yang lebih menysasar masyarakat menengah atau perkotaan. Dari hasil penelitian, baik Melly Pangestu dan Benektidus Narendra Keswara sama- sama menggunakan slogan “Anti Korupsi dan Anti Intoleransi”. Berangkat dari kemenangan dua caleg PSI tersebut, dapat disimpulkan anti korupsi dan anti intoleransi menjadi isu strategis yang coba ditawarkan caleg PSI kepada masyarakat perkotaan di Kota Semarang. Dapil satu Kota Semarang (Semarang Tengah, Timur, Utara) dan dapil dua Kota Semarang (Gayamsari, Genuk, Pedurungan) termasuk daerah perkotaan bisa dibilang merupakan centernya kota semarang. PSI adalah partai yang identik dengan masyarakat urban atau masyarakat yang tinggal didaerah komplek perumahan. Keadaan demografi Kota Semarang tentu memberi keuntungan dan kemudahan bagi caleg PSI untuk masuk ke dalam masyarakat tersebut.

Persoalan tentang korupsi dan intoleransi adalah isu strategis untuk diangkat mengingat persoalan seperti, ekonomi dan peningkatan pendidikan tidak menjadi prioritas masyarakat perkotaan yang ditandai dengan corak pekerjaannya yang cenderung formal, tingkat ekonomi menengah ke atas dan tingkat pendidikan yang tinggi. Masyarakat perkotaan tentu menganggap isu tentang anti korupsi dan anti intoleransi dinilai penting untuk dibahas dan disikapi. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang pekerjaannya non-formal, ekonominya menengah kebawah, serta tingkat pendidikan rendah persoalan tentang anti korupsi dan intoleransi barangkali dibahas namun tidak menganggap persoalan tersebut lebih penting dibandingkan persoalan tentang ekonomi, perbaikan infrastruktur, rendahnya harga panen dan pendidikan yang mahal. Masalah- masalah tersebut dianggap lebih penting bagi masyarakat pedesaan karena itulah masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Berikut ini kesesuaian antara segmentasi khalayak, sasaran atau target politik dan isu kampanye yang digunakan.

**Tabel 13. Kesesuaian Segmentasi, Sasaran dan Isu Kampanye yang Digunakan Caleg PSI**

Tahapan Perencanaan Isu	Melly Pangestu dan Beneditus Narendra Keswara
Segmentasi	Geografi dan kerapatan (density) populasi
Sasaran	Masyarakat Perkotaan
Isu Kampanye	“Anti Korupsi dan Intoleransi”

Sumber : *Analisis Primer*

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan bahwa tidak lolosnya partai baru ke DPR tidak berarti mereka gagal menjual jargon atau program politik. Alasannya, mesti tidak masuk DPR, sejumlah partai baru berpeluang besar menempatkan wakil di DPRD.

“Isu itulah (toleransi) yang melahirkan tiga juta pemilih kami, ini isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Di daerah seperti Semarang, Surabaya dan Aceh, isu ini menjadi alasan orang mencoblos PSI sehingga kami dapat mengalahkan partai besar,” kata Tsamara saat dihubungi BBC News Indonesia (Utama, 2019).

Sejalan dengan pernyataan Tsamara, Partai Solidaritas Indonesia memperoleh suara yang cukup baik di Kota

Surabaya sebanyak 4 kursi dan Semarang 2 kursi. Sedangkan yang cukup mengejutkan, PSI mampu berada pada posisi empat besar partai pemenang pemilu di Jakarta dengan perolehan 8 kursi.

## **2. Kekuatan Suara Pemilih Partai**

Pada hasil pemilu di Kota Semarang, partai Solidaritas Indonesia memiliki jumlah suara pemilih partai lebih besar dibanding suara pemilih caleg. Format kertas suara pada pemilihan legislatif 2019 mencantumkan nama dan tanda gambar partai juga disertakan daftar calon anggota DPRD dari setiap partai berdasarkan nomor urut. Adapun cara penyuaaraan (*balloting*) yang digunakan adalah dengan mencoblos tanda gambar partai saja, dan atau tanda gambar partai sekaligus nama calon legislatif yang terdapat dalam daftar. Dalam penyuaaraan kertas suara tersebut, suara dinyatakan sah apabila pemilih, memilih tanda gambar partai saja, memilih calon legislatif yang terdapat dalam daftar saja, atau memilih tanda gambar partai dan memilih calon legislatif yang terdapat dalam daftar secara bersamaan. Suara dianggap tidak sah apabila memilih tanda gambar dari sebuah partai, tetapi memilih nama calon legislatif dari partai lain secara bersamaan.

Jumlah suara partai Solidaritas Indonesia lebih besar dibandingkan jumlah suara caleg PSI. Fenomena ini terjadi pada setiap dapil, kecuali pada dapil 6 (Semarang Selatan dan Semarang Barat). Berbeda dari partai-partai lain, yang cenderung suara pemilih caleg lebih besar ketimbang suara pemilih partai. Ferdian Fajar beranggapan, hal tersebut terjadi di karenakan pemilih- pemilih PSI adalah pemilih yang idealis. Ferdian Fajar dalam wawancara mengatakan :

“Artinya apa dari situ sudah bisa kita tangkap, orang yang idealis. Dia suka dengan PSI, tapi dia tidak kenal calegnya, dia pilih partainya. Hampir bisa dipastikan itu suara tetap“ (Ferdian, Semarang 30 Juli 2019).

Caleg- caleg dari partai PSI kurang dikenal oleh masyarakat, namun nama PSI sendiri sudah dikenal oleh masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Melly Pangestu :

“suara partai besar karena orang mengenal PSI tapi mengenal secara pribadi dari calegnya itu yang kurang. Mungkin keterbatasan kita kurang begitu menyentuh semuanya. Jadi dari pada bimbang yang mana jadi coblos partainya. Itu kadang yang menyebabkan tidak signifikan di dapil 2 lumayan. Kalau di dapil saya setengah- setengah suara partai sama suara caleg. Ketika saya tanya (konstituen)



kenapa coblosnya suara partai ? mereka jawab, ya bingung kamu nomor berapa. Jadi saya coblos partainya. Yang diingat nama PSInya tapi tidak ingat nama calegnya” (Melly, Semarang 1 Agustus 2019). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Benediktus Narendra Keswara :

“DPD Pusat sudah membantu, anda pasti tau PSI. Kenal sama Grace Natalie, tapi tidak kenal calegnya maka sudah coblos partainya.”(Wawancara Benediktus, Semarang 30 Juli 2019)

Sebagai partai baru dalam pemilu tahun 2019, nama PSI sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Walaupun dalam hal ini caleg PSI di Kota Semarang kurang dikenal namun masyarakat sudah lebih dulu tertarik dengan partainya.

### **C. Faktor Penghambat Strategi Kampanye Caleg PSI Kota Semarang**

Dalam menjalankan strategi kampanye pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang, caleg PSI mengalami beberapa hambatan antara lain.

#### **1. Berita Hoax**

Berita hoax atau berita bohong merupakan salah satu bentuk dari kampanye hitam (*black campaigning*) yang dilakukan oleh pihak lawan. Pengertian kampanye hitam

adalah kampanye yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyerang lawannya dengan meniup isu bohong, informasi yang sengaja diedarkan lebih banyak bohongnya dari pada benarnya (Cangara, 2016: 318). Sedangkan secara umum kampanye hitam dapat diartikan sebagai kegiatan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh lawan politik baik ia seorang calon, partai politik, tim sukses atau para pendukung calon elit politik tersebut terhadap lawan mereka (Cangara, 2016: 319). Di Indonesia praktek kampanye hitam sudah sering terjadi pada pemilihan umum. Dalam pemilihan legislatif di kota semarang, PSI juga tidak luput diterpa isu kampanye hitam.

PSI yang mengangkat isu toleransi dan menolak Perda (Peraturan Daerah) yang berlandaskan agama, dianggap sebagai partai yang anti Islam. Hal ini disampaikan oleh ketua DPD Kota Semarang Ferdian Fajar mengatakan.

“Isu nasional yang turun ke lapangan, PSI dicap sebagai partai yang anti Islam padahal saya sendiri muslim” (Ferdian, Semarang 30 Juli 2019).

Selain dicap sebagai partai anti Islam, PSI juga diisukan sebagai partai yang mendukung kebijakan LGBT.

Berhembusnya kabar mengenai PSI mendukung kegiatan LGBT sebenarnya berawal dari terpasangnya spanduk yang mengatas namakan PSI yang terpasang di jalan Abdul Syafie, Tebet Jakarta Selatan. Kemudian kabar tersebut menyebar ke daerah- daerah lain melalui media sosial. Hal ini disampaikan oleh caleg PSI dapil 2 kota Semarang Benediktus.

“Selain itu banyak orang kasih (berita) Hoax. Berita-berita hoax untuk menjatuhkan PSI secara umum. Salah satunya diisukan partai yang mendukung LGBT” (Benediktus, Semarang 1 Agustus 2019).

Gambar 11.

Berita Hoax

"Jadi siapapun dia, kalau memang dia melanggar hukum dia harus siap di proses hukum tapi siapapun dia juga, tidak boleh di-bully atau dikriminasi" imbuhnya.

Sementara terkait pelaporan spanduk dukungan LGBT yang mengatasnamakan PSI kepada pihak kepolisian, kata Dero, hal itu semata-mata untuk memberikan pelajaran bagi pelaku penyebar kampanye hitam. Apalagi, dia bilang, spanduk tersebut bukan dibuat oleh partainya.



Sumber : *Data Sekunder*

Untuk menepis kampanye hitam tersebut, caleg- caleg PSI segera memberi pernyataan kepada konstituen dan masyarakat luas bahwa isu PSI sebagai partai anti islam dan mendukung LGBT adalah berita yang tidak benar.

Sikap politik yang dewasa dan lebih mengedepankan akal sehat sangat diperlukan untuk menghindari munculnya kampanye hitam. Pemerintah sudah berupaya dalam memberantas kampanye politik yang mengandung kebencian, fitnah dan kebohongan yang sering muncul pada pemilihan umum. Salah satunya mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah di seluruh Indonesia, pada Nomor 2 huruf (f), menyebarkan berita bohong (hoax) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk, antara lain (Umaimah, 2016: 183). (1) penghinaan (2) Pencemaran nama baik (3) Penistaan (4) Perbuatan tidak menyenangkan (5) Provokasi (6) Hasutan (7) Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Artinya dalam kampanye politik dilarang untuk melakukan kegiatan bentuk apapun seperti butir-butir yang disebutkan di atas. Bagi siapa pun yang melanggar tentunya ada konsekuensi hukum yang berlaku.

## 2. Pendanaan Kampanye

Menjadi seorang anggota DPRD rasanya tidak mungkin tanpa ditunjang dengan dana yang besar. Sudah menjadi rahasia umum ketika, nilai satu kursi legislatif dihargai dengan jumlah uang yang sangat mahal. Perubahan sistem proporsional daftar tertutup menjadi daftar terbuka, juga berimbas pada kenaikan dana kampanye calon legislatif. Hal ini karena pada sistem proposional daftar terbuka, para peserta tidak hanya bersaing dengan peserta di partai lain, tetapi juga dengan peserta dari partainya sendiri. Kondisi yang terjadi pada pemilu legislatif 2009 dalam penggunaan sistem proporsional terbuka, para peserta pemilu menganggap titik berat kampanye oleh caleg. Kandidat akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kemenangan. Partai politik sebatas memfasilitasi kandidat untuk kampanye sehingga poerolehan kursi cukup banyak (Labolo, 2015: 222). Menurut Notulen FGD *Mengulas Komponen dan Biaya Belanja Kampanye Pemilu* yang diikuti oleh Labobo menyebutkan, calon anggota DPRD Provinsi mengeluarkan dana antara Rp 250 juta hingga Rp

750 juta, sedangkan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota mengeluarkan dana antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta.

Menurut hasil laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) caleg PSI yang diserahkan oleh KPU Kota Semarang sebagai wujud implementasi keterbukaan kepada publik. Biaya kampanye yang digunakan jumlahnya lebih rendah dibandingkan partai-partai lain. Melly Pangestu sebagai caleg DPRD Kota Semarang terpilih, mengatakan:

“Untuk Dana kampanye saya sendiri habis enam juta lima ratus, modal kampanye di PSI itu minim seminim-minimnya. Sepunyanya, jadi tidak ada kalimat maharnya berapa, kalimat habis berapa ratus juta. Di PSI kita sepunyanya”(Melly, Semarang 1 Agustus 2019).

Jumlah total biaya yang dikeluarkan Melly Pangestu untuk menjalankan kegiatan kampanye yaitu sebesar Rp 6,5 juta. Adapun dana kampanye saluran tidak langsung berupa spanduk, stiker, dan pamflet, Melly mendapat sumbangan dari anggota keluarganya. Dana pribadi yang dikeluarkan, sebagian besar dihabiskan untuk melakukan teknik kampanye saluran langsung, melalui mengadakan kegiatan langsung dan *door to door*. Sementara, Benediktus hanya

menghabiskan dana sebesar Rp 200 ribu. Dalam wawancara Benediktus mengatakan :

“Dana kampanye saya habis dua ratus ribu, modal saya Cuma cetak kartu nama saja”(Benediktus, Semarang 23 Agustus 2019).

Benediktus juga menegaskan bahwa jumlah tersebut juga sesuai dengan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPU Kota Semarang. Walaupun jumlah dana kampanye tersebut diragukan kepastiannya. Dengan menggunakan dana kampanye tersebut Benediktus berhasil mendapatkan 2346 suara dan lolos sebagai anggota DPRD Kota Semarang dari dapil dua.

Kampanye bukanlah ajang pertarungan uang akan tetapi dirancang sebagai ajang pertarungan ide, gagasan dan kreatifitas tinggi untuk menarik dukungan masyarakat. Walaupun strategi untuk mendapatkan kursi legislatif tidak selamanya harus dengan pengeluaran uang sebanyak-banyaknya, melainkan terletak pada upaya serta kapabilitas calon yang diusung suatu partai. Namun Jumlah dana kampanye yang kalah jauh dari caleg partai lain, tentu menjadi kendala tersendiri. Pasalnya disaat caleg lain

berkampanye menggunakan dana kampanye yang berlebihan. Caleg PSI justru melakukan proses kampanye dengan sangat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. ATK (alat peraga kampanye) yang digunakan sangat minim dibandingkan partai-partai besar lain. Caleg PSI beranggapan kampanye dengan menghabiskan banyak dana untuk membuat baliho-baliho, poster-poster ataupun spanduk-spanduk selain mencemari lingkungan juga merusak pemandangan. Selain itu caleg PSI juga beranggapan bahwa pendanaan kampanye yang besar beresiko untuk menjadikan caleg tersebut melakukan tindakan korupsi, caleg PSI sangat menghindari pendanaan kampanye yang berlebihan.

### **3. Pembatasan Wilayah Kampanye**

Sebuah kampanye politik, tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan dari pihak lawan. Salah satu hambatan yang dihadapi caleg PSI yaitu ancaman yang datang dari ranah eksternal partai. Caleg PSI mendapat ancaman tidak boleh berkampanye dalam kawasan yang sudah dikapling oleh partai lawan. Pengalaman tersebut datang dari caleg Melly Pangestu mengatakan :

“Ada basis-basis yang dikotak-kotakan sama tim-tim khusus dari masing-masing partai. Bahwa ini



kandang merah, ini kandang hijau. Kendalanya memang ada, karena ketika kita mau masuk mereka sudah menstop bahwa ini (wilayah) basisnya ini, kamu tidak boleh masuk. Tapi mengingat ini adalah pesta rakyat itu kewajiban kita juga untuk menyampaikan bahwa ini adalah hak rakyat juga untuk mengenal siapa nanti wakilnya yang dipilih. Karena saya pernah sekali dicut seperti itu, trus saya ngomong sama pak RW-nya. Kalau anda sebagai RW ikut cut hak dari masyarakat untuk mengenal saya berarti itu adalah pelanggaran juga karena ini adalah hak dan kewajiban. Dan ini adalah hak saya untuk mengenal mereka dan hak mereka untuk mengenal saya. Ketika anda bilang di sini kandang si ini dan tidak boleh di sini itu adalah keputusan sepihak. Jadi kendalanya ya itu tadi di masyarakat kadang kita diterima dengan sesuatu yang pengkotak-kotakan itu tadi” (Melly, Semarang 1 Agustus 2019).

PSI sebagai partai baru dalam pemilihan serentak 2019 memang belum memiliki kekuatan yang baik di akar rumput. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kader-kader PSI yang ada di Kota Semarang masih kalah jauh dengan kader-kader yang berasal dari partai lama yang sudah mapan. Sehingga ketika ada partai baru masuk di daerah partai lawan, tentu menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi partai mapan.

#### **4. Kekosongan Figur partai**

Salah satu kunci keberhasilan sebuah partai politik adalah dengan mengandalkan keberadaan tokoh sentral atau figur partai. Tanpa adanya tokoh sentral, partai politik akan mengalami kesulitan karena tokoh- tokoh tersebut bukan hanya seorang figur saja. Tokoh sentral atau figur bisa dijadikan menjadi mesin politik yang dapat digerakan, karena pengaruh figur tidak hanya berda pada tingkatan nasional saja, melainkan juga tingkat daerah. Kekuatan figur menjadi kekuatan penting bagi partai untuk mendapatkan dukungan, misalnya partai Demokrat yang mengandalkan figur Sosilo Bambang Yudhoyono dan partai Gerindra yang mengandalkan figur Prabowo Subianto. PSI adalah partai yang secara tegas menolak model partai yang bertumpu pada kekuatan figur. Partai politik tidak boleh dan tidak pernah boleh disandera hanya oleh kepentingan satu atau segelintir orang (Tim PSI, 2015: 27). Berbeda dari partai politik lain yang justru mengandalkan kekuatan figur dalam memobilisasi dukungan masyarakat. Tidak adanya figur partai pada PSI tentu menjadi kendala tersendiri dalam memenangkan suara masyarakat.

## D. Implikasi Teori

Berdasarkan uraian kerangka teoritik pada Bab. 1 sub. 1.6 yang menjelaskan tentang Demokrasi Elektoral, kepemilikan isu dan komunikasi Politik. Maka implikasi teorinya adalah caleg PSI di Kota Semarang menggunakan strategi kepemilikan isu dan komunikasi politik di dalam kampanye pada pemilihan legislatif 2019.

**Tabel 14. Analisis Strategi Kampanye Caleg PSI Kota Semarang**

No	Teori	Implikasi Teotitis	Temuan
1	Demokrasi Elektoral	Teori ini berbicara tentang ciri dasar bagi sebuah demokrasi yaitu pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol	Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai inti dari demokrasi itu sendiri ( <i>substantive democracy</i> ). Secara normatif dan administratif memang disebutkan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Namun praktiknya calon wakil rakyat yang

		<p>pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh Dahl.</p>	<p>berpeluang besar untuk dipilih oleh rakyat adalah mereka yang mempunyai modal finansial yang besar. Dalam temuan dilapangan penulis menemukan tanpa memiliki modal finansial yang besar pun caleg PSI berhasil menjadi DPRD Kota Semarang. Caleg PSI menggunakan isu politik dan pesan politik sebagai instrumen utama dalam menjaring dukungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui saluran kampanye yang digunakan seperti spanduk, poster, stiker dan media sosial yang sering digunakan yaitu <i>Facebook</i>.</p>
2	Kepemilikan Isu	<p>Teori iniberbicara tentang isu-isu yang dimiliki oleh partai politik. Kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan juga menjadi salah</p>	<p>Partai Solidaritas Indonesia memiliki isu-isu antara lain, Partainya anak muda, Partainya Perempuan(Pengesahan RUU Kekerasan</p>

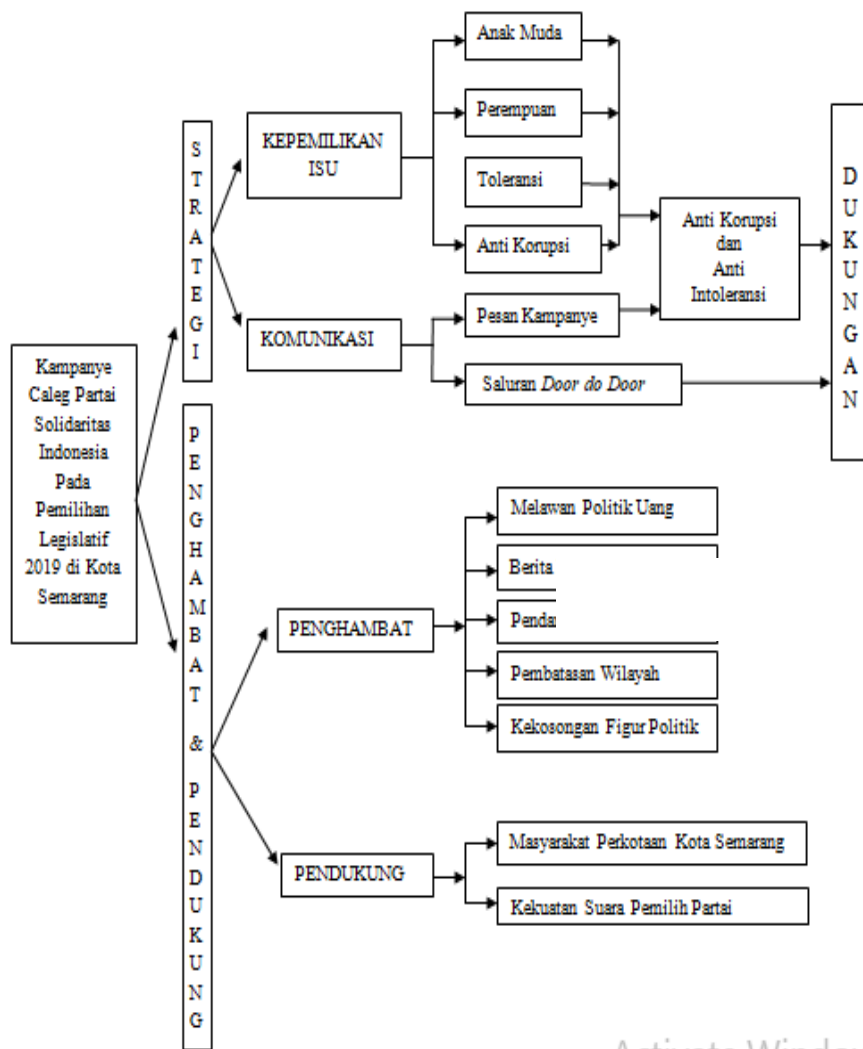
		<p>satu akses kemenangan bagi para calon dari satu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut (Petrocik).</p>	<p>Seksual, Penaikkan batas usia menika dan anti poligami), Toleransi (Menolak Peraturan Daerah berlandaskan agama ) dan Anti Korupsi. Isu-isu tersebut digunakan sebagai salah satu strategi kampanye caleg PSI Kota Semarang untuk memperoleh dukungan. Isu tentang Anti Korupsi dan Toleransi menjadi isu andalan yang digunakan caleg PSI Kota Semarang dalam melakukan kampanye.</p>
--	--	---	---

3	Komunikasi Politik	Komunikasi politik sebagai <i>body of knowledge</i> memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sumber ( <i>komunikator</i> ), penerima ( <i>komunikan</i> ), pesan ( <i>message</i> ), media atau saluran dan efek (Cangara).	Unsur-unsur dalam strategi komunikasi politik yang digunakan caleg PSI Kota Semarang, meliputi. <b>Komunikator politik</b> yakni caleg PSI. <b>Pesan politik</b> yang disampaikan yaitu menggunakan isu politik Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan isu yang sering dimainkan yakni anti korupsi dan anti intoleransi. <b>Saluran</b> yang sering digunakan caleg PSI yaitu kampanye <i>door to door</i> . <b>Sasaran</b> atau <b>target</b> politik yang diharapkan dapat memberikan dukungan yakni masyarakat Kota Semarang. <b>Efek</b> yang tercipta yakni terpilihnya caleg PSI sebagai anggota DPRD Kota Semarang 2019.
---	--------------------	---	---

Sumber : *Analisis Primer*

## **E. Model Strategi Kampanye Caleg PSI**

Berbicara mengenai model strategi kampanye, tentu merujuk pada suatu pola dari proses kampanye yang bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Berikut model kampanye calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Semarang.



Activate Windows



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi kampanye yang digunakan oleh caleg PSI Kota Semarang pada pemilu legislatif 2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi kampanye politik yang dilakukan oleh Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara dalam pemilu legislatif 2019 yakni. *Pertama*, strategi kepemilikan isu. Adapun isu- isu nasional yang dimiliki PSI (a) Partainya anak muda, (b) Partainya perempuan (c) Toleransi (d) Anti korupsi. Caleg PSI Kota Semarang mempunyai slogan bersama yaitu “Anti Korupsi dan Anti Intoleransi”. Isu tentang anti korupsi dan anti intoleransi menjadi isu utama yang digunakan Melly Pangestu dan Benediktus Narendra Keswara pada kampanye pemilihan legislatif 2019 di Kota Semarang. Kedua, Strategi Komunikasi yang digunakan oleh Caleg PSI yakni. (a) Pesan politik. Pesan politik yang digunakan disampaikan melalui slogan “Anti Korupsi dan

Anti Intoleransi”. (b) Kampanye Politik teknik *door to door*. Teknik kampanye semacam ini lebih mampu memberikan pesan kepada masyarakat secara langsung sehingga menimbulkan kepercayaan dan kejelasan mengenai bentuk keijakan yang dijanjikan. Kampanye teknik *door to door* merupakan strategi yang dianggap cukup sukses untuk meranarik dukungan masyarakat. Selain itu, memperkenalkan caleg-caleg PSI melalui *door to door* langsung ke masyarakat sangat perlu dilakukan mengingat PSI merupakan pendatang baru di lingkungan politik Kota Semarang.

2. Faktor pendukung keberhasilan caleg PSI dalam memenangkan pemilihan legislatif Kota Semarang 2019 yaitu (a) Masyarakat perkotaan Kota Semarang. Persoalan tentang korupsi dan intoleransi adalah isu strategis untuk diangkat mengingat persoalan seperti, ekonomi dan biaya pendidikan tidak menjadi prioritas masyarakat perkotaan. (b) Kekuatan suara pemilih partai Solidaritas Indonesia di Kota Semarang. Jumlah suara partai Solidaritas Indonesia lebih besar dibandingkan jumlah suara caleg PSI. Fenomena tersebut terjadi pada setiap dapil, kecuali pada dapil 6 (Semarang Selatan dan Semarang Barat). Berbeda

dari partai- partai lain, yang cenderung suara pemilih caleg lebih besar ketimbang suara pemilih partai.

3. Faktor penghambat keberhasilan caleg PSI dalam memenangkan pemilihan legislatif Kota Semarang 2019 yaitu (a) Berita hoax. PSI yang mengangkat isu toleransi dan menolak Peraturan Daerah berlandaskan agama, dianggap sebagai partai yang anti Islam. Selain itu PSI juga diisukan sebagai partai yang mendukung kebijakan LGBT. (b) Pendanaan kampanye. Strategi mendapatkan kursi legislatif memang tidak selamanya harus dengan pengeluaran uang sebanyak- banyaknya. Namun jumlah dana kampanye yang berbeda jauh dari dari caleg partai lain, tentu menjadi kendala tersendiri. (c) Pembatasan wilayah kampanye. Caleg PSI mendapat ancaman tidak boleh berkampanye dalam kawasan yang sudah dikapling oleh partai lawan. (d) Kekosongan figur partai Solidaritas Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Sebagai partai baru, PSI harus lebih meningkatkan kekuatan internal partai di akar rumput, kader di akar

rumpun harus bisa bergerak menjadi mesin politik untuk meningkatkan suara partai.

2. DPD PSI Kota Semarang perlu meningkatkan peran partai dalam memberikan bantuan kampanye kepada caleg-calenya, khususnya dalam hal pendanaan kampanye.
3. Sebagai partai yang progresif, PSI harus terus menerus menyuarakan masalah- masalah yang sedang hangat, terutama isu- isu yang dinilai masyarakat sangat merugikan.
4. Kekompakan seluruh kader partai Solidaritas Indonesia harus tetap dijaga dengan baik, untuk menarik masyarakat luas agar bergabung menjadi kader partai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku

- Andi, Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta : Ar- Ruzz 2016)
- Bugin, Burham. *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya* (Jakarta : Kencana 2014).
- Creswell, John. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2014)
- Dahl, A. Robert. *Demokrasi dan Para Pengkritik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1992)
- Efriza, Jerry Indrawan. *Komunikasi Politik : Memahami Secara Teoritis dan Empiris* (Malang : Intrans Publishing 2018)
- Emzir. *Analisis Data : Metode penelitian kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Erisman. *Kota Semarang dalam Angka 2018* (Semarang: BPS Kota Semarang 2018)
- Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Semarang : FISIP UIN Walisongo 2017)
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta : Obor Indonesia 2008)
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2008)

- Held. D, *Demokrasi dan Tataan Global: dari negara modern hingga pemerintah kosmopolitan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004)
- Kacung, Marijan. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011)
- Khaliq, Abdoel. *Buku Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang* (Semarang: KPU Kota Semarang 2014)
- Labobo. Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta : PTRajaGrafindo Persada 2015)
- Mawardin, *Mengelola Komunikasi Politik : Sebuah Pengantar Ke Politik Praktis* (Yogyakarta : Suluh Media 2018)
- Nasution, Noviantika. *Bobolnya Kandang Banteng : Sebuah Otokritik* ( Jakarta: Penerbit Suara Bebas 2006)
- Nawawi, Handari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajamada University 1998)
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu* (Yogjakarta : Universitas Gajah Mada 2009)
- Prasojo, Eko, *Demokrasi di Negeri Mimpi; Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance* (Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2016)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2006)
- Sutinah, Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana 2005)

- Suswanto, Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif : Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Erlangga 2015)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo 2010)
- Tabroni. Roni, *Marketing Politik : Media dan Pencitraan di EraMultipartai* (Yogjakarta: Graha Ilmu 2014)
- Tabroni. Roni, *Komunikasi Politik Soekarno* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015)
- Tim PSI. *ABC Partai Solidaritas Indonesia* (Jakarta: 2015)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Venus. Antar, *Manajemen Kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi publik* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2018)
- Zulkifli L, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PTRemaja Rosdakarya 2009)

### **Sumber Dari Jurnal**

- Al-Husaini, Yasser Dharma, "Strategi Komunikasi Politik Kader Muda Partai Gerindra", dalam *Prosiding Hubungan Masyarakat*, Vol.11, No.1, 2016.
- Febriani " Peran anggota legislatif perempuan dalam rapat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam Undang- undang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD" *Jurnal Analisis Politik*, Vol.1, No.2, Maret 2016
- Diyan Nur, Rakhmah. "Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.20, No.4, 2014

- Jefferi C. Martin. Thesis. ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS. Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Department of Government and Justice Studies. 2013
- Lukman, Marpaung. “Strategi Kampanye Partai Golkar” dalam Politik Muda. Vol.5,2016
- Shlomit Barnea and Gideon Rahat, “Out With the Old, in With the New’: What Constitutes a New Party?”, Party Politics, 17, 3 (2010): 303–320. dalam *Konstelasi Politik di Tahun Elektoral* , Vol.2, 2018
- Nurdiansyah Fahmi, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2014”, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.9, No.1, 2018.
- Uber, Fahri dkk, “Strategi Kampanye Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Satu Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014” dalam e-journal Acta Diurna, Vol.5, No.2, 2016
- Ratnia Solihah dkk, “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi” dalam *Jurnal Bawaslu* ISSN 2443-2539, Vol.3, No.1, 2017
- Yustian Yuddi, *Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendetang Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008)
- Sutanto, *Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang* (Semarang :Universitas Negeri Semarang, 2011)



## Sumber Dari Internet

Abdil Mughis Mudhoffir, “Politik Partai Milenial, Seberapa Menjanjikan ?” dalam <https://Indoprogress.com/2018/04/politik-partai-milenial-seberapa-menjanjikan/> 30 April 2018 diakses pada 4 September 2019

Abdul Khaliq, Ahmad, “*Mengenal Platform Partai Perindo*”, dalam <https://nasional.sindonews.com> 6 Februari 2016 diakses pada 12 Juli 2019

Arsy Ani Sucianingsih, “Pemilih pemula dominasi pemilu 2019, apa dampaknya ?” dalam <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pemilih-pemula-dominasi-pemilu-2019-apa-dampaknya> 15 Agustus 2019 diakses pada 1 September 2019

Ayuwuragil, Kustin, “Survei LIPI: Isu SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019” dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003> survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019

Berkarya.id, “*Partai Berkarya siap bidik suara para pecinta soeharto pada pemilu 2019 mendatang*”, dalam <https://berkarya.id/artikel/partai-berkarta-siap-bidik-suara-para-pecinta-soeharto-pada-pemilu-2019-mendatang.html> Januari 2019 diakses pada 12 Juli 2019

CNN Indonesia, “*Grace: Misi PSI di DPR tak dukung perda syariah dan injil*” dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181111215606-32-34-5713/grace-misi-psi-di-dpr-tak-dukung-perda->

[syariah-dan-injil](#) 11November2018 diakses pada 19 Juli 2019.

Fadiyah Alaidrus, “ Dukung Putusan MK, PSI Setuju Usia Perkawinan Minimal 18 Tahun” dalam <https://amp.tirto.id/dukung-putusan-mk-psi-setuju-usia-perkawinan-minimal-18-tahun>. 13 Desember 2018 diakses pada 1 September 2019

Kompas.id, “ PSI: Putusan MK Kemenangan Kecil untuk Perempuan” dalam <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/2018/12/13/> 13 Desember 2018 diakses pada 1 September 2019

Kompas.id, “ PKS tolak RUU Penghapus Kekerasan Seksual karena Isinya Bersifat Liberal” dalam <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/2019/02/05/12340651/pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal5> Februari 2019 diakses pada 13 Juli 2019

Masrukhin Abduh, “*Melejitnya suara PDIP Kota Semarang jadi representasi kepercayaan publik*” dalam <https://metrojateng.com/melejitnya-suara-PDIP-kota-semarang-jadi-representasi-kepercayaan-publik/> 21 April 2019 diakses pada 12 Juli 2019

## Lampiran 1. Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
*Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76433986 Semarang 50185*

---

Nomor : B-1028/Ur.10.6/K/PP.00.9/07/2019 26 Juli 2019  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Benicditus Narendra K. (PSI)  
di Tempat


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwadalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan Penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan Penelitian tentang *Partai Baru dan Strategi Kampanye PSI pada Pemilihan logistik 2019 (Studi Isu-Isu Kampanye Caleg PSI Kota Searang)*

Nama : Sulami Luberty  
NIM : 1506016019  
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
W.B. Dekan  
Kantor Pata Usaha  
Muhammad Royani

Tembusan :  
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

## Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
*Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76433986 Semarang 50185*

Nomor : B-1026/Un.10.6/K/PP.00.9/07/2019

26 Juli 2019

Lamp. : -  
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua DPD PSI Kota Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwadalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan Penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan Penelitian tentang *Partai Baru dan Strategi Kampanye PSI pada Pemilihan logistik 2019 (Studi Isu-Isu Kampanye Caleg PSI Kota Searang)*

Nama : Sulami Luberty  
NIM : 1506016019  
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

## Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
*Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185*

Nomor : B-1027/Un.10.6/K/PP.00.9/07/2019

26 Juli 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ibu Melly Pangestu (PSI)

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwadalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan Penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan Penelitian tentang *Partai Baru dan Strategi Kampanye PSI pada Pemilihan logistik 2019 (Studi Isu-Isu Kampanye Caleg PSI Kota Searang)*

Nama : Sulami Luberty

NIM : 1506016019

Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani

Tembusan :  
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

## Lampiran 2. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Ferdian Fajar	Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang periode 2015- 2020
2	Melly Pangestu	Kader Partai Solidaritas Indonesia yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019- 2024
3	Beneditus N K	Kader Partai Solidaritas Indonesia yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019- 2024

# Lampiran 3. DB1-DPRD Kota Semarang



KABUPATEN/KOTA 1

KOTA SEMARANG

PROTOKOL  
DASAR PEMILIHAN

JAWA TENGAH  
KOTA SEMARANG 2

MODEL  
 DB1 DPRD  
 Kota Semarang  
 Tahun 2018-2023  
 0816-28

NO.	URAIAN	BENCALAN										JUMLAH AMBI
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
<b>II. DATA PEROLEHAN SUKSES PARTAI POLITIK DAN SUKSES CALON</b>												
<b>A.1.1. Partai Indoneisa Indonesia</b>												
A.1.1.1	1. PARTAI INDOONESIA	712	412	2.602								3.606
A.2	2. HIMPUNAN KEMAJUAN KEMASYARAKATAN	255	200	1.147								1.602
A.3	3. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	255	200	1.147								1.602
A.4	4. PERJUANG SUKSES	84	51	131								216
A.5	5. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.6	6. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.7	7. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.8	8. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.9	9. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.10	10. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
A.11	11. PARTAI KEMAJUAN SUKSES	22	34	103								159
<b>B. PARTAI SUKSES DAN PARTAI POLITIK DAN CALON</b>												
<b>A.1. Partai Demokrat Sukses</b>												
A.1.1	1. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.2	2. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.3	3. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.4	4. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.5	5. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.6	6. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.7	7. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.8	8. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.9	9. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.10	10. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
A.11	11. PARTAI SUKSES	1.317	1.129	5.051								6.317
<b>C. PARTAI SUKSES DAN PARTAI POLITIK DAN CALON</b>												
C.1	1. PARTAI SUKSES	2.091	2.071	2.092								2.092



Nama dan Tanda Tangan dari Kota Semarang  
  
 Nama dan Tanda Tangan dari Partai Politik



KABUPATEN/KOTA \*) : KOTA SEMARANG

PROVINSI : JAWA TENGAH  
DIBARAI PERILIHAN : KOTA SEMARANG 1



KODE :  
DIBARAI PERILIHAN  
KAB/KOTA :  
Kategori 3 butir 1

NO.	URUTAN	SEMARANG				Jumlah Absen
		SEMARANG TERBUKA	SEMARANG UTAMA	SEMARANG TERBUKA	SEMARANG TERBUKA	
IV.	DATA PEROLEHAN SUKSES PARTAI POLITIK DAN POLDA CALON	78	101	78	78	336
	<b>KOTA SEMARANG PARTAI DAN CALON</b>					
A.1	11 Partai Golongan Indonesia	1.704	1.204	1.310	1.310	4.528
A.2	1 Partai Golkar	1.292	2.020	1.098	1.098	4.512
A.3	2 Partai Demokrat	655	209	153	153	2.072
A.4	4 ALI MUYAZ KALING SEWANG S. Ikon	421	134	133	133	2.488
A.5	1 PARTAI BURUK	124	101	183	183	454
A.6	1 INDIU PERKOTA 3.HI	13	30	10	10	43
A.7	1 SUKSES	42	62	47	47	150
A.8	1 LOKA BANYUWANG					
	<b>Jumlah Partai dan Calon</b>	3.443	2.996	2.783	2.783	9.224
B.	127 Partai Asesmi Nasional	156	509	172	172	649
A.1	1 SUKSES	152	454	265	265	649
A.2	2 PARTAI SUKSES	4	4	4	4	1.150
A.3	4 BUNDA BUNDA	4	4	4	4	1.07
A.4	1 SUKSES	31	19	49	49	76
A.5	6 SUKSES	91	102	41	41	52
A.6	1 SUKSES	91	102	41	41	52
A.7	1 SUKSES	91	102	41	41	52
A.8	1 SUKSES	91	102	41	41	52
B.	<b>Jumlah Partai dan Calon</b>	599	1.289	628	628	2.800



MAMA DAN MAMA TANGGAL MARI KOTA SEMARANG

MAMA DAN MAMA TANGGAL MARI PARTAI POLITIK

MAMA DAN MAMA TANGGAL MARI PARTAI POLITIK



# Lampiran 4. BA Penetapan Kursi dan Calon Terpilih

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN AGENSI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGA KABUPATEN/KOTA YAHIN 2019

PENGANTARAN PROSESAN GIBIR PARTAI POLITIK  
KOTA SEMALANGI 1  
KOTA SEMALANGI  
KOTA SEMALANGI  
JAWA TENGAH  
KABUPATEN BANGGA  
18

MUDA EL GIBIR ALI GIBIR

No	Nama Partai	Suara Sah (a)	1		3		5		7		Jumlah Kursi (12)
			Suara Sah (a)	Peringkat (b)	Suara Sah (c)	Peringkat (d)	Suara Sah (e)	Peringkat (f)	Suara Sah (g)	Peringkat (h)	
(1)											
1	PARTAI KERANGKONGTAN BANGGA	8626	8626,00	3	2875,33	7	1222,29	10	1222,29	0	
2	PARTAI LUBHUKA	5240	12545,00	3	4282,33	7	1427,78	10	1427,78	0	
3	PARTAI GOLKAR	3232	3232,00	1	1991,67	2	1188,00	4	865,57	3	
4	PARTAI MUDA BANGGA	9801	9801,00	7	2459,00	2	1473,60	4	1053,96	0	
5	Partai Nadhom	499	499,00	7	397,00	7	1960,20	1	1400,14	1	
6	PARTAI GARUDA	1318,00	499,00	7	166,33	7	99,80	7	71,29	0	
7	PARTAI BERKAWA	10365	10365,00	6	439,33	6	763,60	3	188,29	0	
8	PARTAI PERHINO	2892	2892,00	6	3455,00	6	2073,00	4	1480,71	1	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1703	1703,00	8	934,00	8	560,40	8	400,29	0	
10	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	9222	9222,00	8	3074,00	8	1844,40	6	243,29	1	
11	PARTAI MAMUK NASIONAL	2860	2860,00	8	953,33	8	1844,40	6	243,29	0	
12	PARTAI HANUKA	1052	1052,00	8	148,67	8	57,00	8	40,51	0	
13	PARTAI HANUKA	1052	1052,00	8	148,67	8	57,00	8	40,51	0	
14	PARTAI BULAN BERTANG	1384	1384,00	5	348,67	5	2003,20	1	1495,14	1	
15	PARTAI BULAN BERTANG	1384	1384,00	5	461,33	5	278,60	1	107,21	0	
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	227	227,00	6	75,67	1	45,40	0	32,43	0	
JUMLAH KURSI				6		1		1	0	8	

**KOTA SEMALANGI,**  
**TANDA TANGAN KONDISI-PENULIS UMUM KOTA SEMALANGI**

1. HENRI CAHAYA GUSTON  
2. HENDRIANTO  
3. GIBIR MUDA GIBIR  
4. ANINDIYAN  
5. SUWANTO

**TANDA TANGAN ANGGAS PARTAI POLITIK**

1. PARTAI KERANGKONGTAN BANGGA  
2. PARTAI LUBHUKA  
3. PARTAI GOLKAR  
4. PARTAI MUDA BANGGA  
5. PARTAI MUDA BANGGA  
6. PARTAI GARUDA  
7. PARTAI BERKAWA  
8. PARTAI PERHINO  
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
10. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA  
11. PARTAI MAMUK NASIONAL  
12. PARTAI HANUKA  
13. PARTAI HANUKA  
14. PARTAI BULAN BERTANG  
15. PARTAI BULAN BERTANG  
16. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Active  
Go to 5

# Lampiran 4. BA Penetapan Kursi dan Calon Terpilih

PERHIMPATAN PERSEKUTUAN ORANG PARTAI POLITIK  
 PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

Halaman 11 dari 11

DAFTAR PEMILAH  
 KABUPATEN BOGOR  
 PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2019

No	Nama Partai	Suara Sah		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Jumlah Kursi
		RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	RS	RI	
01	PARTAI BERKORONG BERSAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PARTAI BERKORONG BERSAMA	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1964	2428	1
2	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	77527	5
3	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	2334	1
4	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	5701	1
5	Partai Buruh	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	0
6	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	14956	0
7	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	0
8	PARTAI BERKORONG BERSAMA	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	0
9	PARTAI BERKORONG BERSAMA	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	4217	0
10	PARTAI BERKORONG BERSAMA	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	7991	0
11	PARTAI BERKORONG BERSAMA	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	0
12	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	0
13	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	11755	0
14	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	0
15	PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	0
16	PARTAI BERKORONG BERSAMA	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0
17	PARTAI BERKORONG BERSAMA	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	0
18	PARTAI BERKORONG BERSAMA	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0
19	PARTAI BERKORONG BERSAMA	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	0
20	PARTAI BERKORONG BERSAMA	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0
Jumlah Kursi				7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		11

**DAFTAR PEMILAH**  
**KABUPATEN BOGOR**  
**PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2019**

1. PARTAI BERKORONG BERSAMA  
 2. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 3. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 4. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 5. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 6. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 7. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 8. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 9. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 10. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 11. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 12. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 13. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 14. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 15. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 16. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 17. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 18. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 19. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 20. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. PARTAI BERKORONG BERSAMA  
 2. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 3. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 4. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 5. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 6. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 7. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 8. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 9. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 10. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 11. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 12. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 13. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 14. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 15. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 16. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 17. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 18. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 19. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 20. PARTAI BURUHA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Activate V  
 Go to Setting

## Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Pekalongan tanggal 12 September 1996. Terlahir di keluarga sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu pada tahun 2002, penulis mengawali pendidikannya di TK Batik Pekalongan. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studinya di SD Degayu 01 Pekalongan dan pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 7 Pekalongan.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pekalongan dengan tahun kelulusan 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis aktif dalam kegiatan internal dan eksternal kampus.

Pada tahun 2015- 2019 penulis terdaftar sebagai anggota di UKM Resimen Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Pada tahun 2017- 2018 penulis terdaftar sebagai anggota Generasi Baru Indonesia (GENBI) Jawa Tengah, Beasiswa Bank Indonesia.